



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 58 September 2026

Seputar Kita

Gubernur Lemhannas RI Ajak
Perguruan Tinggi Bentuk Gen Z
sebagai Arsitek Masa Depan
Indonesia

Profil Pejabat

Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta,
M.Si., CSFA: "Kerjakan Saja; Jika Kita
Bekerja, Tuhan Pasti Melihat"

Opini

Lemhannas RI Sebagai Garda
Terdepan dalam Menghadapi
Ancaman Perang Kognitif
(Cognitive Warfare)



Versi Digital

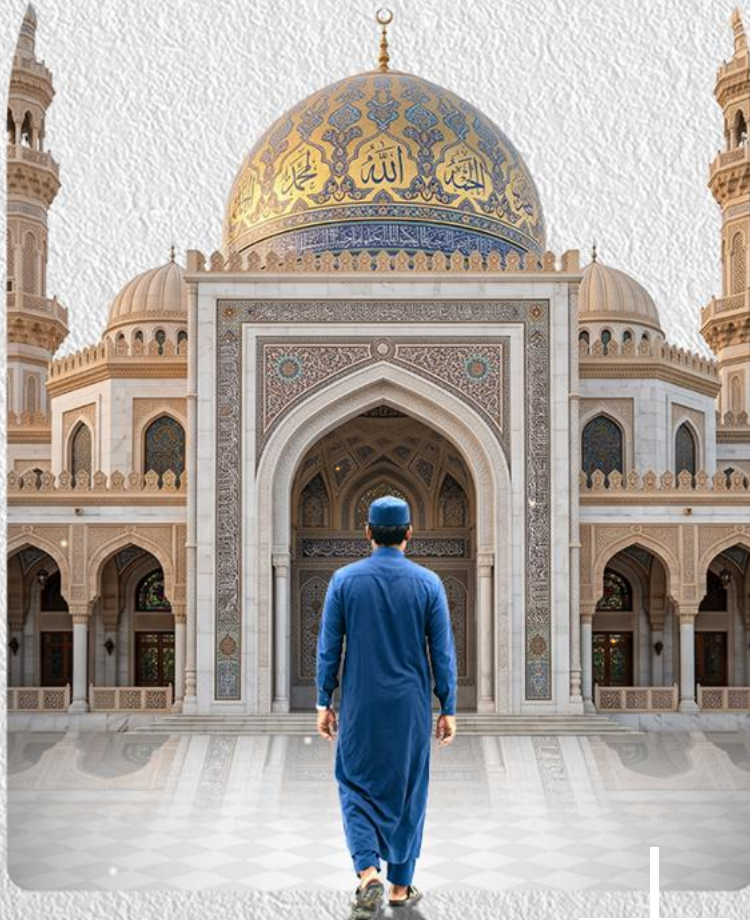
JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM X/2026:

PENGUATAN MULTILATERALISME DI TENGAH FRAGMENTASI GLOBAL



Selamat Memperingati
**Maulid Nabi
Muhammad SAW**

12 Rabiulawal 1448 H





PELINDUNG ACE HASAN SYADZILY

PENGARAH GATOT TRI SURYANTA

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

MUHAMMAD ARIF NUR

REDAKTUR BAMBANG IMAN ARYANTO

PENYUNTING/EDITOR CAHYAQADRI HILDAMONA,

MAGISTA DIAN FITRILIA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER WIA YUNIA PUTRI

SEKRETARIAT DWI ARIYANI, MAULIDA ARBANINGSIH

**PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH, NAOMI
AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN, DWI ARIYANI**

**ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110**

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahananannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

**SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI
DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI**

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 58, September 2026, kembali hadir di tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya menghadirkan berbagai informasi pilihan melalui beragam rubrik yang disajikan secara informatif dan menarik. Semoga berbagai sajian dalam edisi ini dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan, serta memberikan perspektif baru bagi para pembaca.

Rubrik Laporan Utama pada edisi kali ini membahas Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 bertema "Strengthening Multilateralism: Survival Amid Global Turbulence and a Fragmented World".

Melalui rubrik Seputar Kita, Majalah Swantara menyajikan berbagai informasi mengenai ide, gagasan, serta kegiatan yang dilaksanakan Lemhannas RI. Rubrik Profil Pejabat menghadirkan sosok pejabat Lemhannas RI yang baru dilantik, sementara Profil Pegawai mengangkat kisah dan kiprah personel Lemhannas RI yang dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca. Melengkapi sajian tersebut, rubrik Opini, Hot News, dan Ragam turut menghadirkan beragam informasi dan perspektif yang diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya pengetahuan pembaca setia Majalah Swantara.

Kami menyadari bahwa Majalah Swantara masih memiliki ruang untuk terus berkembang dan disempurnakan. Karena itu, saran dan masukan dari para pembaca senantiasa kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, sekaligus untuk menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas Majalah Swantara pada edisi-edisi mendatang.

Terakhir, tim redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam terbitnya Majalah Swantara Edisi 58, September 2026. Semoga Majalah Swantara dapat memberikan banyak manfaat dan berkesan di hati para pembaca.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namo Buddhaya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026: Penguatan Multilateralisme di Tengah Fragmentasi Global

SEPUTAR KITA



- 11 Kepala BNPT RI Dorong Sinergi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Terorisme terhadap Infrastruktur Energi
- 12 Gubernur Lemhannas RI Ajak Perguruan Tinggi Bentuk Gen Z sebagai Arsitek Masa Depan Indonesia
- 14 Gubernur Lemhannas RI Tekankan Pentingnya Karakter Kebangsaan Kepada Mahasiswa PKKMB UNS



- 16 Wakil Gubernur Lemhannas RI Terima Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi
- 18 Gubernur Lemhannas RI: Generasi Muda Harus Tampil sebagai Penjaga Ketahanan Nasional
- 20 Gubernur Lemhannas RI Harap Peserta PPNK Angkatan ke-74 Dapat Perkokoh Tekad sebagai Satu Bangsa dengan Satu Tujuan



- 21 Gubernur Lemhannas RI Mengimbau Guru, Dosen, dan Widyaiswara Untuk Tidak Lelah Membekali Diri
- 22 Wakil Gubernur Lemhannas RI Pimpin Diskusi Terkait Ekonomi Guna Pemerataan Kesejahteraan Rakyat
- 24 Universitas Trisakti Diharapkan Menjadi Pionir Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045

SEPUTAR KITA



- 26 Lemhannas RI Kaji Penguatan Sistem Politik Inklusif Bagi Generasi Muda
- 28 Wamenlu RI: Kita Tidak Menghadapi Satu Krisis, Tetapi Menghadapi Satu Simpul



- 29 Gubernur Lemhannas RI Bertolak ke Sumatera Barat Guna Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan
- 30 Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan ke-4 Tahun 2026 Resmi Dibuka

OPINI



- 32 Diplomasi Indonesia di Tengah Konflik Rusia dan Ukraina
- 34 Membangun Bangsa dimulai dari Kejujuran pada Niat yang Ditopang oleh Penegakan Hukum dan Budaya Malu sebagai Pondasi Kemajuan Indonesia
- 38 Lemhannas RI Sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Ancaman Perang Kognitif (*Cognitive Warfare*)

PROFIL PEJABAT

40



Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA: "Kerjakan Saja; Jika Kita Bekerja, Tuhan Pasti Melihat"

PROFIL PEGAWAI

44



Cahyaqadri Hildamona Permatasari, S.Si., M.Si.: Jalani Amanah dengan Tanggung Jawab

HOT NEWS



- 46 Lawatan ke Rusia: Prabowo Gagas Rute Langsung & Tegaskan RI Nonblok
- 47 Takhta Tertinggi Merah Putih: Jonatan Christie Peringkat 1 Dunia

RAGAM



- 48 Pesona Jingga dari Pegunungan Poso: Mengenal Rhododendron yombuwurii, Flora Baru Indonesia
- 49 Dua Ngengat Baru di Jantung Nusantara

SUARA PESERTA



- 50 Bawa Nama Institusi, Atiatul Huda Raih Predikat Akademik Terbaik P4N 69
- 51 Mendapat Predikat Taskap Terbaik Sonny Tampubolon Dorong Legalitas Pertambangan Emas Rakyat

52 GALLERY





Jakarta Geopolitical Forum X/2026 Penguatan Multilateralisme di Tengah Fragmentasi Global

Pada tahun ini, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) X/2026 untuk kesepuluh kalinya dengan mengangkat tema “Strengthening Multilateralism: Survival Amid Global Turbulence and a Fragmented World”. Selama satu dekade terakhir, fragmentasi global telah mengubah tatanan internasional secara mendasar, dari sistem yang semula relatif terbuka dan saling terhubung menjadi lanskap yang semakin terpolarisasi dengan kepentingan strategis sebagai pendorong utamanya.

Menurut Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dinamika tersebut bukan sekadar isu diplomatik yang jauh dari kehidupan sehari-hari,

melainkan persoalan yang secara langsung menyentuh ketahanan hidup masyarakat Indonesia. Fragmentasi global dirasakan di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, keamanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data pemerintah, hingga keamanan infrastruktur kritis. Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa pembahasan geopolitik juga mencakup ketahanan harian rakyat Indonesia serta kapasitas strategis negara.

Sejalan dengan tema besar yang diusung tahun ini, “Strengthening Multilateralism: Survival Amid Global Turbulence and a Fragmented World”, forum tersebut merefleksikan keprihatinan bersama terhadap kondisi multilateralisme yang selama ini menjadi salah satu pilar tata kelola global, namun kini menghadapi

tekanan akibat menguatnya logika kekuasaan, proteksionisme strategis, serta persaingan dalam ekosistem teknologi.

Kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia terus bersaing untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui pendekatan realisme klasik, mulai dari penyeimbangan kekuatan, pembentukan aliansi yang dinamis, proyeksi kapabilitas militer, hingga pengutamaan kepentingan nasional di atas norma-norma global. Di bidang teknologi, persaingan ini tercermin melalui upaya agresif untuk menguasai teknologi mutakhir. Sementara itu, di bidang ekonomi, dampaknya terlihat pada rekonstruksi rantai pasok global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, pandemi Covid-19, serta risiko keamanan nasional.

Menyikapi perkembangan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa penguatan multilateralisme merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia yang harus didukung oleh ketahanan domestik yang kuat. Fondasi internal yang kokoh akan memperkuat posisi dan kredibilitas suara Indonesia di kancah internasional. Untuk itu, ketahanan nasional perlu didukung oleh perekonomian yang aman, rantai pasok dan energi yang andal, sumber daya manusia unggul, kesiapan digital, kohesi sosial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang berlangsung cepat.

Ace mengingatkan bahwa ketika aturan bersama melemah, pihak yang paling terancam adalah mereka yang bergantung pada hukum, kerja sama, dan kepastian. Oleh karena itu, Indonesia terus menjunjung politik luar negeri bebas dan aktif dengan bekerja sama dengan semua pihak tanpa didominasi oleh siapa pun, serta secara konsisten menempatkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan penghormatan terhadap hukum internasional dalam satu kerangka strategis.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak akan menyurutkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Menurutnya, politik bebas aktif bukanlah netralitas yang pasif, melainkan kebebasan untuk menentukan posisi dalam setiap isu serta keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan terseret ke dalam blok-blok eksklusif maupun memaknai kemitraan berdasarkan kalkulasi yang saling menjatuhkan.

Menurut Sugiono, multilateralisme masih mampu menghasilkan capaian yang nyata. Karena itu, Indonesia berkomitmen untuk tetap aktif di meja perundingan, turut membentuk aturan, serta membela dan memperbaiki sistem multilateral. Di tengah kecenderungan fragmentasi global, Indonesia memilih untuk menghadapinya dengan melihat setiap disrupsi bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk membuka pasar, menjalin kemitraan, dan membentuk aturan main baru.

Kemunduran Multilateralisme

Fragmentasi geopolitik global menunjukkan melemahnya multilateralisme yang selama beberapa dekade menjadi salah satu pilar tata kelola global. Institusi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menghadapi keterbatasan efektivitas akibat persaingan antarnegara besar dan politisasi dalam pengambilan keputusan. Kebuntuan di Dewan Keamanan PBB akibat penggunaan hak veto kerap menghambat tindakan kolektif dalam menangani konflik bersenjata dan pelanggaran hukum internasional.

Dominasi negara-negara adidaya juga semakin memengaruhi dinamika global. Persaingan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia dalam bidang militer, ekonomi, teknologi, dan geopolitik mendorong negara-negara kuat untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan komitmen terhadap hukum internasional. Intervensi militer tanpa mandat multilateral, aneksasi wilayah, dan penerapan sanksi ekonomi secara unilateral menunjukkan semakin kuatnya kecenderungan tersebut.

Kemunduran multilateralisme turut terlihat dari melemahnya rezim pengendalian senjata, meningkatnya persaingan militer, serta semakin lazimnya penggunaan kekuatan dalam penyelesaian konflik. Kondisi ini berisiko mengikis legitimasi sistem internasional dan menggantikannya dengan tatanan yang berlandaskan pada kekuatan.

Dalam situasi tersebut, negara-negara menengah dan kecil menghadapi dilema antara mempertahankan norma multilateral yang melemah dan beradaptasi dengan logika kekuatan yang semakin dominan. Persaingan kekuatan besar yang kian tajam pun mendorong negara-negara kekuatan menengah, termasuk Indonesia, untuk lebih realistis, fleksibel, dan pragmatis dalam merajut kerja sama internasional.

Pro Vice-Chancellor for Research and Professor of International Relations, La Trobe University, Prof. Nick Bisley, menjelaskan bahwa situasi tersebut berbeda dengan era pasca-Perang Dingin yang dinilai sangat menguntungkan bagi negara-negara kekuatan menengah. Bisley mengatakan bahwa era pasca-Perang Dingin merupakan masa yang sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat karena supremasinya menciptakan stabilitas strategis dengan tidak adanya rivalitas antarkekuatan besar.

Menurut Bisley, stabilitas strategis pasca-Perang Dingin memungkinkan multilateralisme berkembang melalui PBB dan berbagai forum regional berbasis ASEAN, seperti ARF, ADMM-Plus, dan KTT Asia Timur. Namun, situasi kini berubah seiring tatanan ekonomi global yang menjadi arena persaingan geopolitik sehingga mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih nasionalistik. Dalam kondisi tersebut, negara kekuatan menengah, termasuk Indonesia, hanya dapat memengaruhi tatanan internasional tanpa mampu menetapkan aturan secara sepihak.

Sementara itu, National Coordinator for Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP), Prof. Dr. Georgy Toloraya, memaparkan perspektif Rusia mengenai tatanan dunia yang bergerak menuju multipolaritas. Ia menyebut Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara adidaya, sementara Rusia berada pada posisi sub-adidaya dengan hak veto, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan global secara mandiri.

Toloraya juga menekankan pentingnya ASEAN sebagai model regionalisme berbasis konsensus dan menolak upaya memecah ASEAN menjadi faksi pro-Tiongkok atau pro-Amerika Serikat. Ia juga menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pemimpin alami negara-negara Global South dan dapat lebih aktif memperjuangkan kepentingan negara-negara tersebut.

Menurutnya, kerja sama Rusia dan Asia Tenggara dapat diperluas di bidang energi, ketahanan pangan, pertahanan, teknologi nuklir damai, antariksa, teknologi digital, dan BRICS Plus. Ia juga mengusulkan forum tertutup "Wise Men's Club" berbasis BRICS untuk mencari solusi atas krisis global, dengan Indonesia sebagai salah satu calon tuan rumah.

Dari perspektif hukum internasional, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai efektivitas hukum internasional masih terkendala oleh ketiadaan otoritas yang dapat memaksakan penegakan hukum terhadap negara berdaulat. Kekuasaan, menurutnya, tetap berperan penting dalam politik global, sebagaimana ditunjukkan oleh penolakan Tiongkok terhadap putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) 2016 terkait Laut Cina Selatan.

la juga menyoroti dilema Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam menghadapi klaim tumpang tindih, termasuk perbedaan penekanan dalam pernyataan bersama dengan Tiongkok dan Amerika Serikat pada 2025. Hikmahanto menawarkan dua pendekatan bagi Indonesia, yakni mempertahankan status quo untuk mencegah konflik terbuka sambil memperkuat kerja sama, serta menunggu perubahan kepemimpinan global yang lebih berkomitmen pada hukum internasional dan perdamaian.

la menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif tetap tepat bagi Indonesia untuk memiliki banyak teman dan tidak memiliki musuh, tanpa harus bersikap netral ketika kepentingan nasional terancam.

Pergeseran Menuju Proteksionisme Strategis

Fragmentasi ekonomi global saat ini mencerminkan pergeseran dari orientasi pada efisiensi pasar menuju logika keamanan dan ketahanan nasional. Restrukturisasi rantai pasok dan diversifikasi produksi bukan semata-mata strategi mitigasi risiko, melainkan juga instrumen geopolitik. Negara-negara maju berupaya memindahkan basis produksi strategis ke negara mitra yang dipercaya, sementara negara-negara berkembang menghadapi tekanan untuk menyesuaikan standar, kebijakan industri, dan orientasi perdagangan agar tetap terintegrasi dalam jaringan produksi global.

Persaingan di sektor energi semakin memperdalam fragmentasi tersebut. Ketegangan geopolitik dan konflik regional terus memengaruhi stabilitas pasokan minyak dan gas, menjadikan energi sebagai instrumen pengaruh politik dan ekonomi. Negara-negara besar memanfaatkan sanksi, embargo energi, dan pengendalian teknologi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya sehingga pasar energi global semakin sarat dengan kepentingan politik.

Meningkatnya penerapan tarif, subsidi industri, dan kebijakan proteksionis di berbagai negara menunjukkan bahwa perdagangan global semakin dipengaruhi oleh persaingan ekonomi dan upaya melindungi industri domestik. Negara-negara besar menggunakan instrumen perdagangan sebagai alat tekanan strategis, sementara kesenjangan



Menlu RI Sugiono saat memberikan Keynote Speech di Jakarta Geopolitical Forum X/2026 (Foto. Humas Lemhannas RI)

kapasitas ekonomi menjadikan negara-negara berkembang rentan terhadap standar perdagangan yang diskriminatif dan volatilitas pasar global.

Dengan demikian, fragmentasi ekonomi bukan sekadar respons terhadap suatu krisis, melainkan cerminan kontestasi struktural dalam sistem ekonomi internasional ketika negara-negara besar berupaya mempertahankan dominasinya, sementara negara lain berjuang menjaga kedaulatan ekonomi dan ruang pembangunan mereka.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc., dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa perdagangan harus tetap menjadi jembatan, bukan medan pertempuran, di tengah transformasi mendalam yang tengah berlangsung dalam perekonomian global. Ia menyampaikan bahwa perdagangan kini tidak lagi dipandang dari sudut pandang efisiensi dan akses pasar, melainkan telah erat kaitannya dengan keamanan nasional, kepemimpinan teknologi, kebijakan industri, serta pengaruh geopolitik.

Ia menjelaskan bahwa respons Indonesia terhadap dinamika tersebut adalah membangun ketahanan melalui percepatan implementasi perjanjian dagang yang telah disepakati serta investasi berkelanjutan pada teknologi maju, infrastruktur digital, industri hijau, dan sumber daya manusia.

Pada sesi panel yang mengangkat tema "The Shift Toward Strategic Protectionism: Power Competition Across Green Energy, Financial System and International Trade",

Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, Dr.rer.nat Arief Wijaya menegaskan bahwa ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan sebuah keharusan dan menjadi satu-satunya jalur bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk terus berkembang.

Menurut Arief, hilirisasi nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi salah satu strategi kunci pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Namun demikian, Arief mengingatkan bahwa langkah-langkah industri hijau dapat berubah menjadi permainan zero-sum apabila digunakan untuk mengecualikan negara produsen, membatasi akses pasar, atau dijadikan hambatan nontarif melalui standar internasional yang tidak inklusif. Karena itu, ia menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan standar global yang inklusif.

Sejalan dengan hal tersebut, Energy, Mining & Business Development Expert dan Vice Chairman of Djakarta Mining Club Ben Lawson, Ph.D., mengapresiasi langkah Indonesia yang berhasil menghindari resource curse dengan menghentikan ekspor bijih mentah dan mengembangkan hilirisasi logam di dalam negeri, meski menurutnya kebijakan tersebut tetap perlu dijalankan secara terukur.

Lawson turut menyoroti sejumlah tantangan dalam iklim investasi pertambangan nasional, di antaranya sistem kuota produksi (RKAB) yang

menurutnya kurang rasional, aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dinilai menyerupai kontrol modal, serta perizinan eksplorasi yang belum kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum, transfer teknologi sekaligus pengetahuan, serta konsistensi kebijakan fiskal untuk menjaga daya tarik investasi jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Global Head of Central Bank and Head of Asia-Pacific (Ex China), World Gold Council, Shaokai Fan, MPA, mengulas dampak geopolitik terhadap sistem moneter internasional, khususnya melalui pergerakan pasar emas dunia. Ia menjelaskan bahwa total emas yang ada di bumi saat ini hanya sekitar 200 ribu ton, dengan sekitar 70 persen permintaan yang berasal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Fan mengungkapkan bahwa pembelian emas oleh bank sentral dunia melonjak sejak 2022, dari rata-rata 500 ton menjadi sekitar 1.000 ton per tahun.

Fan menilai Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan sebagai produsen emas terbesar di Asia Tenggara sekaligus peringkat kesepuluh dunia, termasuk melalui pembelian emas yang terus dilakukan Bank Indonesia dalam dua tahun terakhir. Ia berharap ke depan akan semakin banyak integrasi emas ke dalam sistem keuangan Indonesia, di tengah tren dedolarisasi global dan persaingan sejumlah pusat perdagangan emas baru di kawasan Asia.

Persaingan Teknologi Global

Fragmentasi teknologi global kini berkembang menjadi arena persaingan strategis yang tidak hanya menentukan

keunggulan ekonomi, tetapi juga supremasi keamanan dan pengaruh geopolitik. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor semikonduktor mencerminkan upaya sistematis untuk menguasai tulang punggung ekonomi digital dan sistem persenjataan modern.

Persaingan tersebut meluas ke pengembangan kecerdasan buatan (AI), komputasi, dan infrastruktur digital global yang berpotensi menciptakan kekuatan baru antarnegara. AI telah menjadi pengganda kekuatan yang dapat meningkatkan kemampuan intelijen, sistem senjata otonom, operasi siber, dan manipulasi informasi dalam skala besar. Integrasi AI ke dalam sistem militer dan keamanan berpotensi mempercepat siklus pengambilan keputusan dalam peperangan, mengurangi peran manusia, dan meningkatkan risiko eskalasi konflik yang tidak disengaja.

Negara-negara dengan populasi usia produktif yang besar berpotensi memperoleh bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja di sektor teknologi, manufaktur maju, dan ekonomi digital. Namun, otomatisasi berbasis AI dan robotika juga berpotensi menggantikan pekerjaan berkeahlian rendah dan menengah, memperlebar kesenjangan keterampilan, serta menuntut program peningkatan dan pengembangan kembali keterampilan dalam skala besar. Dengan demikian, teknologi menjadi faktor penentu apakah bonus demografi akan menghasilkan pertumbuhan yang inklusif atau justru meningkatkan kemiskinan struktural.

Di sisi lain, ekspansi ekonomi digital dan sistem terintegrasi berbasis data menciptakan kerentanan baru terhadap

ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam jangka panjang, tanpa kerangka tata kelola global yang efektif, persaingan teknologi berisiko memperdalam fragmentasi sistem internasional, memperlebar kesenjangan digital, serta membuka ruang bagi ekosistem AI untuk mengubah karakter konflik dan stabilitas global di masa depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI Nezar Patria, saat memberikan sambutan pada Sesi Panel Ketiga Jakarta Geopolitical Forum X/2026 Lemhannas RI, menyampaikan bahwa kecerdasan buatan merupakan teknologi serbaguna yang nilainya akan diperebutkan oleh negara-negara yang membangun sumber daya manusia, kapasitas komputasi, tata kelola data, dan keterkaitan industri.

Ia turut menyoroti persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok yang kini berlangsung melalui kendali cip canggih serta kemandirian produksi AI dalam negeri. Namun, keduanya sama-sama berisiko terlalu berfokus pada sektor mutakhir dan strategi pembatasan, sementara investasi pada basis yang lebih luas masih kurang. Celah inilah yang menurutnya membuka ruang bagi negara kekuatan menengah seperti Taiwan dan Korea Selatan, sehingga Indonesia pun didorong untuk mengambil peran serupa, bukan sekadar menjadi penonton dalam rivalitas kedua raksasa tersebut.

Terkait hal ini, Wamenkomdigi menyebutkan bahwa Indonesia memiliki empat kartu strategis. Pertama, kekuatan sumber daya, di mana nikel, tembaga, timah, bauksit, dan silika memberikan posisi yang berarti bagi Indonesia dalam rantai nilai hulu. Meski demikian, Indonesia masih perlu meraih lebih banyak nilai tambah di luar sekadar ekstraksi dan pemrosesan.

Kedua, kekuatan pasar. Indonesia memang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Ketiga, kekuatan demografi, di mana populasi yang muda dan fasih digital menjadi kekuatan nyata, tetapi perlu diarahkan agar para pengguna tersebut dapat bertransformasi menjadi pengembang melalui pengembangan talenta AI dan semikonduktor. Kartu strategis terakhir adalah kemampuan komputasi.



Sesi Panel Pertama dengan Tema "The Decline of Multilateralism in the Multipolar Era: Super Power Dominance and Challenges to International Norms (Foto. Humas Lemhannas RI)

Wamenkomdigi menekankan bahwa keunggulan mineral kritis tetap menjadi kekuatan terbesar Indonesia. Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam tiga dari lima mineral kritis, meliputi cadangan nikel terbesar di dunia, produsen kobalt terbesar kedua, serta pengekspor bijih tembaga terbesar ketiga. Mineral-mineral tersebut esensial bagi infrastruktur AI global. Kekayaan inilah yang memungkinkan Indonesia tidak hanya bergerak sebagai konsumen teknologi, tetapi juga menjadi pemain sentral dalam ekosistem AI global.

Sesi panel ketiga pada forum ini menghadirkan tiga narasumber dari perusahaan teknologi global, yaitu Vice President International Relations, Thales Group, Jean-Noël Bonniue; President Director at ITSEC Asia, Patrick Rudolf Dannacher; dan President Director Rockwell Automation Indonesia, Adi Darmawan. Ketiganya secara bersama-sama menegaskan bahwa penguatan ketahanan digital Indonesia membutuhkan sinergi antara kemitraan teknologi yang terpercaya, tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang matang, serta transformasi industri menuju sistem yang lebih otonom.

Menurut Adi Darmawan, tuntutan ini tidak hanya berlaku bagi sektor manufaktur, tetapi juga bagi industri minyak dan gas, pertambangan, pembangkit listrik, pusat data, infrastruktur, hingga logistik. Ia memaparkan perjalanan transformasi industri dari era mekanisasi hingga era digitalisasi dan konektivitas yang kini bergerak menuju operasi otonom. Transformasi tersebut ditopang oleh tiga teknologi utama, yakni otomasi berbasis perangkat lunak dengan teknologi digital twin, pemanfaatan AI dalam desain hingga pemeliharaan sistem, serta penggunaan autonomous mobile robot untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penanganan material.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peluang otomasi dan otonomi industri dapat membantu Indonesia memperluas kapasitas industri, menarik investasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, selama diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak semata-mata bertujuan menekan biaya tenaga kerja.

Senada dengan hal tersebut, Jean-Noël Bonniue memaparkan bahwa proses digitalisasi yang telah berjalan selama beberapa dekade kini mengalami



Sesi Panel kedua dengan tema "The Shift Toward Strategic Protectionism: Power Competition Across Green Energy Financial System and International Trade" (Foto. Humas Lemhannas RI)

percepatan signifikan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, berkembangnya serangan siber berbasis kecerdasan buatan, serta munculnya ancaman baru dari komputasi kuantum. Ia menegaskan bahwa negara berkekuatan menengah seperti Indonesia perlu memperkuat ketahanan digital melalui pengoperasian sistem yang tidak bergantung pada satu jenis infrastruktur, sekaligus menerapkan kehati-hatian dan selektivitas dalam menentukan mitra teknologi.

Sementara itu, Patrick Rudolf Dannacher menekankan pentingnya aspek etika dan tata kelola dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada pada persimpangan pilihan mendasar, yakni menjadi perancang aturan (rule shapers) atau justru hanya menjadi penerima aturan (rule takers), di tengah perbedaan arah regulasi AI antara Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Selain itu, Dannacher juga memaparkan sejumlah risiko dalam penggunaan model bahasa besar, seperti rekayasa perintah berbahaya (prompt injection), halusinasi AI, dan kebocoran data. Menurutnya, risiko-risiko tersebut memerlukan pengawasan ketat sebelum diterapkan pada institusi strategis seperti Kementerian Pertahanan maupun kepolisian.

Ia turut mengungkapkan bahwa pada 2030, Indonesia diperkirakan kekurangan sembilan juta pekerja teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan kesenjangan talenta digital yang mencapai 450 ribu hingga 600 ribu orang per tahun, di tengah lonjakan serangan siber hingga 420 persen. Menanggapi hal tersebut, ia mengajukan tiga rekomendasi utama, yakni

mengatasi ketergantungan pada sumber daya manusia, menerapkan regulasi berbasis risiko yang disertai sertifikasi dan kepemimpinan regional, serta membangun mekanisme penjaminan (assurance) AI yang independen.

Dari rangkaian pertukaran gagasan yang produktif ini, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., meyakini bahwa para pembicara dan peserta memiliki pemahaman bahwa Indonesia sebagai kekuatan menengah harus terus aktif di tengah fragmentasi global. Semua pihak, lanjutnya, diharuskan tetap aktif membangun jembatan, memperkuat ketahanan regional, memperluas kemitraan strategis, dan menegakkan kerja sama internasional yang adil, inklusif, serta berbasis aturan.

Dalam konteks ini, Ace Hasan menilai kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tetap sangat relevan. Kebijakan tersebut memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan semua mitra, terhindar dari ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan tunggal, melindungi kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi pada tatanan internasional yang lebih seimbang dan damai.

Bagi Indonesia, langkah selanjutnya adalah memperkuat ketahanan pada tiga tingkat, yaitu ketahanan nasional melalui lembaga-lembaga yang kuat, sumber daya manusia, daya saing ekonomi, keamanan energi, dan kesiapan digital; ketahanan regional melalui kohesi ASEAN dan kerja sama praktis; serta ketahanan global melalui revitalisasi multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional. (MDF)

Kepala BNPT RI Dorong Sinergi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Terorisme terhadap Infrastruktur Energi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. (Purn) Eddy Hartono, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam melindungi infrastruktur energi strategis dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketahanan energi dan stabilitas nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT RI saat memberikan ceramah kepada peserta P4N Angkatan 70 Lemhannas RI, Senin (3/8). Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT RI menyampaikan materi berjudul “Penguatan Kewaspadaan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Terorisme terhadap Infrastruktur Energi Strategis untuk Memperkuat Ketahanan Energi dalam rangka Ketahanan Nasional”.

Menurut Eddy Hartono, infrastruktur energi strategis merupakan bagian penting dalam menopang kehidupan bangsa. Energi menggerakkan berbagai aktivitas pemerintahan, pertahanan, ekonomi, industri, transportasi, telekomunikasi, hingga pelayanan

publik. Karena itu, gangguan terhadap infrastruktur energi dapat berdampak luas pada stabilitas nasional dan perlu mendapatkan perlindungan serta pengamanan yang memadai.

Ancaman terorisme terhadap sektor energi dapat berupa serangan fisik, serangan siber, ancaman hibrida, maupun ancaman dari pihak dalam (insider threat). Gangguan tersebut dapat menghambat pasokan energi, menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu pelayanan publik, melemahkan stabilitas nasional, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, Eddy Hartono menekankan pentingnya kewaspadaan nasional yang dibangun melalui kolaborasi seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan Whole of Government and Society diperlukan agar perlindungan infrastruktur energi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi juga menjadi upaya bersama.

“Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utama ketahanan energi,” ujar Kepala BNPT RI.

Untuk memperkuat kewaspadaan nasional, BNPT telah menyusun sejumlah strategi yang mencakup penguatan intelijen, pengamanan infrastruktur vital, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta sinergi antarlembaga. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman sekaligus menjaga keandalan infrastruktur energi.

Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan resiliensi sektor energi dalam menghadapi berbagai gangguan. Dengan infrastruktur yang lebih terlindungi dan kemampuan respons yang lebih baik, ketahanan energi dapat diperkuat sebagai bagian dari ketahanan nasional.

“Melindungi infrastruktur energi adalah menjaga nyawa bangsa, memperkuat ekonomi, dan menjamin masa depan Indonesia,” pungkas Kepala BNPT RI. (NA/MDF)

Foto. Infopublik.id



Gubernur Lemhannas RI Ajak Perguruan Tinggi Bentuk Gen Z sebagai Arsitek Masa Depan Indonesia

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyampaikan pidato kunci pada Seminar Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro (Undip), Rabu (5/8). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Nasionalisme dan Geopolitik: Urgensi dan Metode Pembelajaran untuk Generasi Z di Era Demokrasi Digital”.

Ace Hasan menyampaikan bahwa persaingan antarnegara tidak lagi hanya berlangsung dalam dimensi militer dan ekonomi, tetapi juga meluas ke teknologi, kecerdasan artifisial, keamanan siber, penguasaan data, ruang informasi, dan perebutan pengaruh digital.

Di tengah perubahan tersebut, Indonesia sedang berada pada puncak bonus demografi, dengan generasi Z dan milenial menjadi bagian besar dari struktur penduduk.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, kondisi tersebut menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu penentu kekuatan bangsa pada abad ke-21.

“Bangsa yang mampu melahirkan manusia-manusia unggul, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta memiliki integritas yang kuat, akan menjadi bangsa yang mampu bertahan sekaligus memenangkan persaingan global,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Menurutnya, investasi terbesar bangsa bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia. SDM Indonesia perlu memiliki kecerdasan intelektual, kematangan emosional, moral yang kuat, kemampuan mengambil keputusan, serta karakter kebangsaan.

Ace Hasan menilai generasi Z memiliki posisi strategis dalam perjalanan Indonesia menuju satu abad kemerdekaan pada 2045. Generasi tersebut akan menjadi pengambil keputusan di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, akademisi, diplomasi, dunia usaha, ilmu pengetahuan, TNI dan Polri, hingga kepemimpinan masyarakat.

Karena itu, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan kualitas SDM sejak dini. Pendidikan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menguasai teori, tetapi juga

perlu membentuk calon pemimpin yang berpikir sistemik, berpandangan jauh ke depan, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki keberanian moral untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Mahasiswa juga perlu didorong menjadi pencipta lapangan kerja, inovator, pemecah masalah, dan agen perubahan.

Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa penguatan nasionalisme harus berjalan beriringan dengan ketahanan nasional. Nasionalisme bukan sekadar kebanggaan terhadap simbol negara, tetapi juga komitmen untuk menjaga kepentingan nasional melalui karya, inovasi, kepemimpinan, dan pengabdian.

Ia mengajak perguruan tinggi, dosen, peneliti, mahasiswa, pemerintah, dunia usaha, media, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pembelajaran yang melahirkan generasi unggul, berkarakter, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki wawasan geopolitik. Mahasiswa perlu dilatih untuk memahami isu strategis melalui simulasi, diskusi kebijakan publik, pemanfaatan teknologi digital, laboratorium kebangsaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI meyakini bahwa penguatan kualitas SDM, karakter kebangsaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nasionalisme yang adaptif akan memperkuat kedaulatan, daya saing, dan ketahanan nasional Indonesia.

“Mari kita jadikan generasi Z bukan sekadar saksi perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, tetapi sebagai arsitek utama yang membangun masa depan Indonesia dengan ilmu pengetahuan, integritas, inovasi, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Seminar Kebangsaan tersebut dihadiri oleh guru PPKN SMA/SMK/MA se-Kota Semarang, dosen PKN Undip, dosen PKN Universitas Negeri Semarang, dosen PKN Universitas Pancasakti Tegal, pengurus organisasi mahasiswa Undip dan perguruan tinggi lainnya, serta siswa pengurus OSIS SMA/SMK/MA se-Kota Semarang. (SP/MDF)



Foto. Humas Lemhannas RI

Foto: Humas Lemhannas RI

LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

Gubernur Lemhannas RI Tekankan

Pentingnya Karakter Kebangsaan Kepada Mahasiswa PKKMB UNS



"PKKMB Universitas Sebelas Maret bukan hanya sekadar pengenalan terhadap dunia kampus, melainkan gerbang menuju komunitas akademik untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan berkarakter kebangsaan dalam menyongsong apa yang kita sebut Indonesia Emas 2045,"

Kata Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dalam kegiatan Lemhannas Goes to Campus pada Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, pada Selasa (11/8).

Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa karakter kebangsaan penting untuk memperkuat rasa nasionalisme. Hal tersebut sejalan dengan dunia yang terus berubah dengan cepat. Seluruh mahasiswa UNS yang hadir kelak akan menjadi pemimpin, baik dalam organisasi, komunitas, maupun lembaga pemerintah pusat/daerah. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu membaca perubahan dunia yang disebut geopolitik.

Geopolitik adalah cara suatu negara memahami lingkungan strategisnya, mengelola sumber daya yang dimilikinya, membangun kekuatan nasional, serta menentukan langkah terbaik untuk mencapai kepentingan nasional. Adapun di era digital saat ini, geopolitik juga hadir di ruang kelas, laboratorium, pusat riset, perusahaan rintisan, bahkan di telepon genggam sehari-hari.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa kunci kekuatan sebuah bangsa terletak pada kemampuannya untuk terus menjaga dan memperkuat nasionalisme. Menyoroti kondisi dunia yang tanpa batas dan menjadi bagian dari masyarakat global, bukan berarti menjadikan sebuah bangsa kehilangan identitas kebangsaannya. "Karena itu, adik-adik sekalian penting untuk tetap mencintai bangsa ini. Tidak ada negara yang maju kecuali negara itu cinta terhadap tanah airnya. Bangsa yang kehilangan jati dirinya akan mudah kehilangan arah," tegas Gubernur Lemhannas RI.

Dalam konteks tersebut, generasi muda memiliki posisi strategis sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa yang berani mengambil risiko

dan menyuarakan kemerdekaan Indonesia, seperti melalui organisasi Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan Reformasi 1998. Sejalan dengan hal tersebut, peran mahasiswa sangat penting untuk menjadi penggerak perubahan bagi bangsa Indonesia.

Menjawab berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia, diperlukan kesadaran yang tinggi akan pentingnya bangsa dalam mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Jika SDA Indonesia yang melimpah dapat dikelola dengan baik dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul, Gubernur Lemhannas RI percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan maju.

Oleh karena itu, membangun ekosistem pembelajaran guna membentuk generasi Indonesia yang unggul menjadi hal mutlak bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat sentral dan perlu berkolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, media, serta dunia usaha/industri untuk melahirkan generasi unggul yang intelektual, tangguh, dan berwawasan geopolitik yang kuat. UNS diharapkan tidak hanya mencetak lulusan yang menguasai teori, tetapi juga membentuk pemimpin masa depan yang berpikir sistemik, berpandangan jauh ke depan, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki keberanian moral.

Mengakhiri kuliah umumnya, Gubernur Lemhannas RI berpesan kepada seluruh mahasiswa UNS agar menjadikan masa kuliah untuk membentuk karakter, memperluas wawasan, mengasah kepemimpinan, memperkuat komitmen kebangsaan, serta menjadi pembelajar sepanjang hayat, mampu berpikir kritis, memiliki integritas, merawat persatuan, dan mencintai Indonesia. "Jadikan UNS sebagai rumah pembentuk karakter bangsa berlandaskan empat konsensus dasar bangsa untuk mencetak pemimpin nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," pungkas Gubernur Lemhannas RI. (SP/MDF)

Wakil Gubernur Lemhannas RI Terima Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. menerima Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi yang disematkan oleh Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., di atas KRI Canopus-936 yang berlayar di perairan Teluk Jakarta, Rabu (12/8).

Penyematan brevet tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan, dan komitmen terhadap pengembangan kemampuan hidro-oseanografi nasional. Bidang hidro-oseanografi memiliki peran strategis dalam penyediaan informasi mengenai kondisi dan karakteristik wilayah perairan untuk mendukung kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan navigasi, serta kepentingan nasional.

Sebelum prosesi penyematan, Wakil Gubernur Lemhannas RI bersama

sejumlah penerima brevet lainnya meninjau kegiatan survei hidro-oseanografi di kawasan Pantai Festival Ancol. Peninjauan tersebut mencakup berbagai kegiatan survei, antara lain pengukuran geodetik dan garis pantai, meteorologi, survei menggunakan drone, pengamatan pasang surut, serta praktik levelling.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelayaran menggunakan KAL Alnitak dan KAL Alnilam menuju titik rendezvous KRI Canopus-936. Dalam perjalanan, para penerima brevet melihat secara langsung kegiatan pengukuran arus dan gelombang serta investigasi pipa dan kabel bawah laut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas survei hidro-oseanografi Pushidrosal.

Setibanya di KRI Canopus-936, para penerima brevet mendapat penjelasan mengenai kemampuan kapal serta berbagai peralatan survei hidro-oseanografi yang digunakan Pushidrosal,

termasuk teknologi sonar, autonomous surface vessel, autonomous underwater vehicle, dan unmanned aerial vehicle.

Prosesi penyematan brevet dilaksanakan di Geladak Heli KRI Canopus-936. Rangkaian prosesi diawali dengan pembacaan Surat Keputusan, dilanjutkan penyematan brevet dan pemasangan baret kehormatan Hidro-Oseanografi oleh Danpushidrosal, serta penyerahan sertifikat.





Brevet kehormatan tersebut juga diberikan kepada sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut, antara lain Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, Dankodiklatal Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, Irjenal Laksdya TNI Achmad Wibisono, Asrena Kasal Laksda TNI H. Krisno Utomo, Pangkoarmada III Laksda TNI Dato Rusman S.N., dan Danseskoal Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo.

Penyematan Brevet Kehormatan Hidro-Oceanografi menjadi simbol apresiasi sekaligus komitmen untuk mendukung penguatan kemampuan hidro-oceanografi nasional yang memiliki peran penting bagi pertahanan, keamanan, dan kepentingan nasional. (NA/MDF)

Foto. Humas Lemhannas RI



Foto. Humas Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI: Generasi Muda Harus Tampil sebagai Penjaga Ketahanan Nasional

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menghadapi perubahan global yang berlangsung semakin cepat. Menurutnya, mahasiswa sebagai calon pemimpin harus mampu membaca perkembangan dunia, memiliki wawasan kebangsaan, dan memahami dinamika geopolitik agar dapat menentukan posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI saat menjadi pembicara dalam sesi Lemhannas Goes to Campus: Universitas Hasanuddin Makassar pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Pascasarjana 2026 Universitas Hasanuddin, Kamis (13/8). Dalam kesempatan tersebut, Ace Hasan menyampaikan materi bertajuk "Generasi Muda, Pancasila, dan Ketahanan Nasional: Menjawab Tantangan Era Global".

Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa perubahan dunia yang semakin cepat menuntut mahasiswa pascasarjana sebagai calon pemimpin untuk mampu melihat perkembangan ke depan dan menentukan posisi secara tepat.

"Kemampuan seorang pemimpin ditentukan oleh sejauh mana dia bisa melihat dunia ke depan dan mampu memposisikan diri untuk menghadapi perubahan tersebut," ujarnya.

Menurut Ace Hasan, kemampuan membaca perubahan perlu disertai karakter kebangsaan yang kuat. Generasi muda Indonesia dapat menjadi bagian dari masyarakat global tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan menjadi fondasi agar generasi muda tetap memiliki orientasi yang jelas ketika menghadapi perubahan dan persaingan global.

"Bangsa yang kehilangan jati dirinya akan mudah kehilangan arah," kata Gubernur Lemhannas RI.

Karena itu, generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, integritas, kesadaran geopolitik, dan wawasan kebangsaan. Kesadaran geopolitik membantu generasi muda memahami perubahan lingkungan strategis, sedangkan wawasan kebangsaan menjadi landasan dalam menentukan sikap dan tindakan sebagai warga negara.

Gubernur Lemhannas RI juga menekankan pentingnya empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, keempatnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau birokrasi, tetapi merupakan fondasi yang perlu dijaga oleh seluruh warga negara.

"Konsensus dasar bangsa bukan hanya kewajiban pemerintah atau birokrasi semata, melainkan agenda yang melekat pada setiap warga negara," pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Dalam konteks kepemimpinan, Gubernur Lemhannas RI berharap mahasiswa Universitas Hasanuddin dapat tumbuh sebagai pemimpin yang memiliki karakter kebangsaan, visioner, serta transformatif dan adaptif. Karakter kebangsaan memberikan arah dalam kepemimpinan, visi membantu membaca perubahan, sedangkan kemampuan transformatif dan adaptif diperlukan untuk merespons dinamika zaman.

Gubernur Lemhannas RI mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penerima dampak perubahan global, tetapi turut mengambil peran dalam menentukan masa depan Indonesia. Menurutnya, generasi muda yang memiliki pengetahuan, karakter kebangsaan, dan wawasan geopolitik akan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya berharap mahasiswa Unhas sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan tidak hanya menjadi penonton dunia, namun tampil sebagai penjaga ketahanan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Ace Hasan. (NA/MDF)



Gubernur Lemhannas RI Harap Peserta PPNK Angkatan ke-74 Dapat Perkokoh Tekad sebagai Satu Bangsa dengan Satu Tujuan



Foto. Humas Lemhannas RI

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia secara resmi membuka Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-74 bagi birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, TNI, dan Polri, dalam rangka penguatan karakter dan jati diri bangsa, di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada Rabu (19/8). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Kemandirian Bangsa melalui Astacita guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjaga kepribadian yang teguh dan nilai-nilai luhur agar tidak mudah terinfiltrasi oleh kepentingan yang tidak selaras dengan kepentingan nasional.

Melalui tema yang diangkat, ketahanan nasional, ketangguhan ekonomi,

hingga ketersediaan dan kedaulatan pangan merupakan bagian dari program Asta Cita yang menjadi program nasional. Program tersebut bukan sekadar dokumen rencana, melainkan arah gerak bangsa untuk memperkokoh fondasi negara, menjadikan bangsa Indonesia mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, serta mampu menjawab segala tantangan, terutama tantangan global, dengan kepala tegak dan langkah pasti.

Melalui kegiatan PPNK angkatan ke-74, Gubernur Lemhannas RI berharap kolaborasi lintas sektor dapat terjalin. “Hilangkan sekat-sekat pemisah, satukan persepsi, dan arahkan segala potensi yang dimiliki,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI menegaskan agar program PPNK yang dijalani seluruh peserta, baik birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi profesi, TNI, dan Polri dapat memperkuat sinergi, menyamakan pandangan, dan memperkokoh tekad sebagai satu bangsa dengan satu tujuan.

Oleh karena itu, sinergi kebijakan antara pemerintah, riset akademis, inovasi sektor swasta, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai cita-cita bersama. “Melalui kegiatan PPNK angkatan ke-74 ini pula, saya berharap agar seluruh peserta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan nasional, membangun kepemimpinan nasional yang berkarakter dan berintegritas, serta mampu mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan global dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur Lemhannas RI. Mengakhiri sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum kegiatan yang berlangsung sebagai titik awal membangun Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang dan akan berlangsung selama 8 hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus hingga 26 Agustus 2026. (SP/MDF)

Gubernur Lemhannas RI Mengimbau Guru, Dosen, dan Widyaiswara Untuk Tidak Lelah Membekali Diri

“Dibutuhkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat untuk menjaga ketahanan nasional,”

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Hal tersebut disampaikan saat Gubernur Lemhannas RI memberikan pembekalan pada Pelatihan untuk Pelatih Program Pemanjatan Nilai-Nilai Kebangsaan Angkatan ke-40 bagi dosen, guru, dan widyaiswara di Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (26/8).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa Indonesia menjadi wilayah yang diperebutkan oleh asing. Hal tersebut merupakan akibat dari posisi Indonesia yang berada di titik persilangan perekonomian dunia dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan sumber daya alam yang melimpah.

Kondisi tersebut dihadapkan pada tantangan dinamika geopolitik global. Ketidakpastian global turut memengaruhi dimensi strategis berbangsa dan bernegara diberbagai belahan dunia. Kondisi dunia saat ini dipenuhi dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, keambiguitasan, dan dipenuhi dengan

kompleksitas. Hal tersebut menciptakan dunia yang rapuh, cemas, tidak linear, dan sulit dipahami.

Lebih lanjut Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa disrupsi global yang terjadi merupakan pengaruh dari empat kekuatan besar, yakni urbanisasi, globalisasi, teknologi, dan struktur umur penduduk. Menyoroti faktor struktur umur penduduk, saat ini struktur demografi Indonesia didominasi oleh Generasi Z. Lahir ditengah digitalisasi, generasi Z menjadi generasi yang berhubungan erat dengan resonansi global gerakan sosial. Bahkan data Nezar menunjukkan pada 2025 gerakan Generasi Z menyebar hingga 22 negara di seluruh dunia. Menyoroti hal tersebut, Lemhannas RI menyadari bahwa diperlukan penguatan ketahanan nasional melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan. Penguatan nilai-nilai kebangsaan diharapkan akan membentuk karakter, watak, kepribadian, dan jiwa nasionalisme elemen bangsa guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, Indonesia harus memiliki ketahanan nasional yang tangguh dalam menjawab tantangan global. Ketahanan nasional yang tangguh tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga memerlukan kondisi dinamis bangsa dalam menjamin eksistensi, integritas, dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. “Ketahanan nasional yang rapuh tidak akan dapat mewujudkan tujuan nasional,” ucap Gubernur Lemhannas RI.

Mengakhiri ceramahnya, Gubernur Lemhannas RI mengimbau seluruh peserta kegiatan untuk tidak lelah membekali diri, khususnya dalam tugas sebagai guru, dosen, dan widyaiswara. Diharapkan para peserta kegiatan dapat memegang ketahanan nasional sebagai raksaka dharma, yaitu penjaga nilai-nilai kebangsaan. “Jangan pernah lelah membekali diri, karena dari pelatihan inilah lahir para penggerak kebangsaan yang tangguh,” pungkas Gubernur Lemhannas RI. (NA/MDF)



Foto. Humas Lemhannas RI

Wakil Gubernur Lemhannas RI Pimpin Diskusi Terkait Ekonomi Guna Pemerataan Kesejahteraan Rakyat

“Pembangunan nasional pada hakikatnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbesar nilai produk domestik bruto,” kata Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma. Dalam Round Table Discussion (RTD) Kajian jangka Panjang “Penguatan Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkualitas untuk Mewujudkan Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat” pada Rabu (26/8), Wakil Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa pembangunan nasional juga seharusnya diarahkan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi mampu memperluas kesempatan, meningkatkan

produktivitas masyarakat, menciptakan pekerjaan yang layak, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan nasional.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 6.187,2 Triliun Rupiah. Nilai tersebut



"Pembangunan nasional pada hakikatnya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperbesar nilai produk domestik bruto."

Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma

menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I tahun 2025 yang hanya sebesar 4,87 persen dan triwulan IV tahun 2025 yang hanya sebesar 5,39 persen.

Menyoroti hal tersebut, Lemhannas RI memandang pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dianalisis lebih mendalam untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi tidak hanya bersifat tinggi secara agregat, melainkan juga produktif, inklusif, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat daerah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan pada Triwulan I tahun 2026 masih ditopang terutama oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dan menguasai 54,36 persen struktur PDB. Konsumsi pemerintah meningkat sangat tinggi sebesar 21,81 persen, antara lain dipengaruhi oleh front-loading belanja, pelaksanaan program prioritas nasional, dan momentum hari besar keagamaan. Pembentukan modal tetap bruto

tumbuh 5,96 persen dan memiliki pangsa 28,29 persen terhadap PDB. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,90 persen, jauh lebih rendah daripada pertumbuhan impor yang mencapai 7,18 persen. Menurut Wakil Gubernur Lemhannas RI, kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya penguatan kapasitas produksi nasional, peningkatan daya saing ekspor, pendalaman industri, dan pengurangan ketergantungan terhadap barang impor.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si. yang hadir sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa outlook APBN Tahun 2026 mengambil langkah ekspansif dan terukur. “APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber, tetapi juga sebagai agent of development dan protecting the poor secara optimal,” ucap Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa APBN menjaga pasokan dan

stabilisasi harga energi dan pangan melalui subsidi dan kompensasi, menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan perlintas, memberikan stimulus ekonomi bagi dunia usaha, dan mengalami efektivitas program prioritas dan perbaikan tata kelola dalam berbagai program prioritas.

Turut hadir dalam RTD tersebut narasumber lainnya, yakni Deputy Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden RI Prof. Popy Rufaidah, S.E., M.B.A., Ph.D.; Staf Khusus Kementerian PPN/ Bappenas Riatsu Mariatul Qibthiyah, S.E., M.A., Ph.D.; Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Bapak Vid Adrison, Ph.D.; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani; dan Deputy Manager Litbang Kompas Ibu Karina Isna. (NA/MDF)

Foto. Magnific

UNIVERSITAS TRISAKTI
DARI BABAK PENTIN
BANGSA DAN TUMB
KEBANGSAAN MAHA

LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

Universitas Trisakti Diharapkan Menjadi Pionir Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045



"Maka hari ini perjuangan adik-adik harus dilakukan melalui ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, kewirausahaan, ruang digital yang sehat dan pengabdian kepada masyarakat."

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyampaikan kuliah umum pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Kampus A, Universitas Trisakti, pada Kamis (27/8). Kuliah umum tersebut disampaikan dalam rangka Lemhannas goes to Campus, program pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI.

Mengawali paparannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan kegiatan PKKMB bukan hanya sekadar pengenalan terhadap dunia kampus, melainkan gerbang menuju komunitas akademik untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan berkarakter kebangsaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI turut



Foto. Humas Lemhannas RI

mengungkapkan bahwa Universitas Trisakti telah menjadi bagian dari Sejarah Indonesia dan menjadi simbol keberanian mahasiswa yang turut mengantarkan Indonesia ke era reformasi tahun 1998.

“Maka hari ini perjuangan adik-adik harus dilakukan melalui ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, kewirausahaan, ruang digital yang sehat, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Gubernur Lemhannas RI. Menurutnya, keberanian dapat diwujudkan dalam berpikir kritis, berintegritas tinggi, menolak hoaks dan disinformasi, mampu melawan korupsi, dan menjaga persatuan. Gubernur Lemhannas RI berharap seluruh mahasiswa yang hadir tidak hanya menjadi pewaris Sejarah Trisakti, melainkan juga turut memberikan kontribusi bagi Indonesia.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan generasi muda yang

mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar budayanya. Oleh karena itu, jati diri bangsa harus tercermin dalam nilai yang kita yakini dan perilaku yang dijalankan. Jati diri tersebut berasal dari nilai pancasila, bhinneka tunggal ika, gotong royong, musyawarah, toleransi, keadilan, persatuan, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

Mahasiswa yang menjadi bagian dari generasi muda diharapkan memiliki karakter bela negara, yang artinya bersedia hidup, belajar, bekerja, dan berkarya untuk membuat negara Indonesia menjadi lebih baik. “Ketika adik-adik mampu menunjukkan prestasinya, mampu membawa nama baik Trisakti di kancah negara internasional, itu juga adalah bela negara,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa mahasiswa membutuhkan resilience, yakni kemampuan untuk mengantisipasi,

menghadapi guncangan, beradaptasi, bangkit, dan menjadi lebih kuat setelah menghadapi krisis. Indonesia di tahun 2045 akan berusia satu abad, Gubernur Lemhannas RI berharap kepada seluruh mahasiswa Universitas Trisakti dapat berada di garis depan perjalanan bangsa. “Jadilah mahasiswa yang membanggakan almamater. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama, dan jadilah generasi yang memberikan yang terbaik bagi Indonesia,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Menutup kuliah umumnya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Trisakti beserta jajaran dan berharap Universitas Trisakti menjadi pionir perubahan dan pusat pembentukan karakter kebangsaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. (SP/MDF)

Lemhannas RI Kaji Penguatan Sistem Politik Inklusif Bagi Generasi Muda

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) yang berjudul “Penguatan Sistem Politik Yang Inklusif Terhadap Generasi Muda Dalam Meningkatkan Demokrasi” bertempat di Ruang Kresna, pada Kamis (27/8). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc.

Dalam laporannya, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. menyampaikan tujuan RTD tersebut agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kajian jangka panjang. RTD kajian jangka panjang tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

“Demokrasi bukan sekadar mekanisme politik formal, melainkan fondasi bagi

pembangunan nasional yang maju, inklusif, dan berkeadilan,” ujar Wagub Lemhannas RI mengawali sambutannya. Dikatakan oleh Wagub Lemhannas RI, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hampir 67 juta penduduk Indonesia berada pada usia muda produktif. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bahwa pemilih generasi muda mendominasi sekitar 55% dari total pemilih pada Pemilu 2024.

Angka tersebut menunjukkan peran strategis generasi muda dalam menentukan arah demokrasi dan pembangunan politik Indonesia. Namun, potensi tersebut masih perlu dioptimalkan, mengingat keterwakilan generasi muda dalam lembaga politik masih terbatas dan literasi politik perlu terus ditingkatkan.

“Oleh karena itu, pada RTD kajian jangka panjang ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana

memperkuat sistem politik yang inklusif terhadap generasi muda dalam upaya meningkatkan demokrasi guna memelihara ketahanan nasional?,” ujar Wagub Lemhannas RI. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan dapat merumuskan opsi-opsi strategis yang adaptif bagi pemerintah.

Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. sebagai salah satu narasumber, menyampaikan bahwa bonus demografi merupakan motor utama penggerak demokrasi yang substansial, menentukan arah kebijakan strategis bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Menyoroti populasi pemilih dari generasi muda yang kian mendominasi, Rifqinizamy Karsayuda memandang fenomena tersebut sebagai momentum emas. Sebagai mitra kerja penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dan Kementerian Dalam Negeri,



Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI berkomitmen untuk menghadirkan regulasi yang mempermudah akses politik pemuda. Komisi II DPR RI akan memastikan perundang-undangan membuka ruang kaderisasi yang meritokratis, menekan praktik oligarki, serta memperkuat pendidikan politik berkelanjutan di internal partai.

Rifqinizamy Karsayuda juga menyampaikan berbagai tantangan inklusivitas saat ini, yaitu sistem elektoral yang berbiaya mahal sehingga menutup akses bagi pemuda yang memiliki kompetensi namun terbatas secara finansial, lalu keterlibatan pemuda yang terkadang hanya sebatas alat penarik simpati (*vote getter*) tanpa pelibatan yang esensial dalam pengambilan keputusan, dan kekecewaan terhadap proses politik yang dianggap korup dapat memicu apatisme massal yang membahayakan konsolidasi demokrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI mendesak seluruh elemen partai politik untuk mengembalikan khittah fungsi utama mereka, yakni pendidikan politik berkelanjutan, bukan sekadar mesin pemenangan saat pemilu. Menurutnya, generasi muda harus diberikan ruang dan posisi tawar yang strategis.

Suara, aspirasi, dan kegelisahan generasi muda harus dikonversi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Oleh karena itu, Rifqinizamy mengharapkan sinergi yang perlu dikolaborasikan dengan Lemhannas RI, yaitu memperkuat Wawasan Nusantara dan pemahaman geopolitik bagi calon pemikir serta pemimpin muda bangsa.

Adapun narasumber lain yang hadir dalam RTD tersebut, yaitu Deputy Bidang

Pelayanan Kepemudaan, KEMENPORA RI Dr. Ir. Hendro Wicaksono, M.Sc.Eng., Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, KEMENDAGRI RI Prof. (H.C) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi, KPU RI August Mellaz, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Prof Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., dan Manajer Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Viola Reininda, S.H., LL.M. (SP/MDF)



Wamenlu RI: Kita Tidak Menghadapi Satu Krisis, Tetapi Menghadapi Satu Simpul

“Dalam foreign policy, fundamental kita adalah bebas aktif. Bukan netral.”

Arif Havas Oegroseno (Wakil Menteri Luar Negeri RI)

Hal tersebut disampaikan dalam kuliah umum kepada peserta P4N Angkatan 70 Lemhannas RI dan personel Lemhannas RI, bertempat di Auditorium Gajah Mada pada Selasa (1/9). Pada kesempatan tersebut, Arif Havas Oegroseno menyampaikan materi tentang Anatomi Ketidakstabilan Global 2025-2030: Proyeksi Ancaman dan Posisi Strategis Indonesia dalam memperkuat Ketahanan Nasional.

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si., membuka kegiatan tersebut dengan menyampaikan bahwa dinamika lingkungan strategis global saat ini semakin berkembang yang ditandai oleh rivalitas geopolitik, konflik bersenjata, ketidakpastian ekonomi, perubahan teknologi, serta munculnya berbagai ancaman nonmiliter yang semakin multidimensional. “Kondisi ini menuntut Indonesia untuk mempunyai kemampuan untuk membaca perubahan secara tajam dan cermat sehingga mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman serta mengambil posisi strategis serta melindungi kepentingan

nasional,” kata Sekretaris Utama Lemhannas RI.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri RI menjelaskan bahwa kebijakan bebas berarti tidak bergantung pada pihak lain atau aliansi lain dalam pengambilan keputusan. “Jadi kita harus punya alternatif dan independensi, sering kalau di dalam dunia luar negeri itu disebut sebagai *strategic autonomy*. Jadi, tingkat otonomi yang strategis,” kata Wakil Menteri Luar Negeri. Sedangkan aktif artinya tidak diam saja, tetapi aktif mengikuti aturan dan aktif menawarkan solusi seperti terlibat dalam pasukan perdamaian dunia.

Dalam konteks hubungan geopolitik saat ini, semuanya dapat dijadikan senjata untuk menyerang. Menyoroti hal tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI merekomendasikan enam perisai ketahanan strategis. Pertama, mengaudit ketergantungan kritis nasional dengan memetakan konsentrasi pemasok, jalur, dan mata uang setiap tahun. Kedua, diversifikasi tanpa decoupling, yang artinya mencari mitra yang baru tanpa meninggalkan mitra yang lama. Ketiga,

membangun penyangga dan simpul alternatif melalui cadangan energi, pangan, rute alternatif, dan backup pembayaran. Keempat, mengubah sumber daya menjadi kemampuan dengan melahirkan teknologi dan keterampilan melalui hilirisasi. Kelima, menjadikan ASEAN sebagai platform geoeкономи melalui percepatan konektivitas dan respons krisis. Keenam, mengamankan stack digital dan kognitif mulai dari data dan chip sampai literasi AI dan komunikasi krisis.

Mengakhiri kuliah umumnya, Wakil Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa saat ini negara dihadapkan pada perubahan cara kerja. Kini yang dihadapi bukan satu krisis, melainkan satu simpul. Kemampuan ketahanan suatu negara adalah bagaimana tetap bisa terkoneksi dan tetap kuat walau dibekukan dari satu simpul. “Satu kondisi yang baru terjadi di dunia yang memerlukan suatu asesmen yang lebih tajam, lebih mendalam, kalau kita ingin melihat anatomi persoalan dunia dan juga bagaimana kita melakukan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasinya,” pungkas Arif Havas Oegroseno. (NA/MDF)



Foto. Humas Lemhannas RI



Foto. Humas Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Bertolak ke Sumatera Barat Guna Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan

“Kita perlu terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan bagi anak-anak muda karena pada generasi muda inilah nasib bangsa akan ditentukan.”

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
(Gubernur Lemhannas RI)

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Lemhannas Goes to Campus Universitas Andalas pada Kamis (3/9). Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan materi bertema “Generasi Muda Sebagai Perikat Persatuan: Menjawab Tantangan Bangsa”.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa nilai-nilai

kebangsaan merupakan bagian dari panggilan moral yang harus tumbuh dalam setiap generasi muda. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan harus terus menjadi komitmen agar generasi muda terus bekerja sebaik-baiknya bagi bangsa kita.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa perguruan tinggi bukan hanya tempat untuk melahirkan dan mencetak para pemikir, tetapi juga harus menjadi penggerak literasi geopolitik bagi generasi muda. “Mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual, tetapi juga harus memiliki wawasan global tanpa menghilangkan identitas nasional,” ucap Gubernur Lemhannas RI.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami geopolitik agar

dapat menempatkan bangsa pada posisi strategis sebagai wujud nyata nasionalisme. “Nasionalisme harus terus diperkuat, dunia saat ini borderless, tanpa batas, yang bisa membuat kita menjadi bangsa Indonesia adalah karena keyakinan bahwa kita berada pada identitas nasional bangsa kita,” kata Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda untuk terus memperkuat identitas nasional agar tidak kehilangan jati diri bangsa. “Bangsa yang kehilangan jati dirinya akan mudah kehilangan arah,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Menyoroti kondisi saat ini, agar generasi muda dapat menjawab tantangan bangsa, Gubernur Lemhannas RI mengajak para generasi muda untuk berpikir kritis, berkarakter kuat, berintegritas tinggi, memiliki kesadaran geopolitik, dan memiliki wawasan kebangsaan. (NA/MDF)

Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan ke-4 Tahun 2026 Resmi Dibuka

Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. menghadiri kegiatan pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Bupati dan Wali Kota Angkatan ke-4 tahun 2026 di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri RI, pada Kamis (3/9). Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus.

Dalam laporannya, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan KPPD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pimpinan daerah yang visioner, adaptif, inovatif dan berkarakter kebangsaan yang kokoh untuk menghadapi dinamika global. Peserta akan dibekali berbagai materi. Dari Kemendagri, peserta akan mendapat materi tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan perencanaan pembangunan daerah.

Dari Lemhannas RI, peserta akan dibekali materi empat dasar konsensus

bangsa, kolaboratif leadership, komunikasi strategis (public communication), hingga materi ketahanan nasional. Purnomo Yusgiantoro Center juga akan membekali para peserta PPD dengan kebijakan hilirisasi, penguatan industri daerah berbasis hilirisasi untuk Indonesia Emas 2045. Ketahanan energi merupakan pilar ketahanan nasional dan daerah. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan materi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy yang diselenggarakan secara daring.

KPPD angkatan keempat, yang diikuti oleh 23 peserta, akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 12 September 2026. Sebagai output dari kegiatan tersebut, setiap peserta diwajibkan menyusun rencana aksi terkait permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing.

Melalui kegiatan KPPD, para bupati dan wali kota sekalian diharapkan dapat keluar sejenak dari rutinitas pemerintahan yang selama ini dijalankan, sehingga memiliki kesempatan untuk melihat dan memahami kembali berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih komprehensif. (SP/MDF)



Foto. Humas Lemhannas RI





Diplomasi Indonesia di Tengah Konflik Rusia dan Ukraina

Irjen Pol Chaidir, S.H., S.I.K., M.Si., M.P.P., M.Han.

Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI

Saat ini tatanan hubungan antarnegara diwarnai berbagai ketegangan politik bahkan sudah mengarah terjadinya peperangan di kawasan Timur Tengah, serangan yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran dengan melibatkan negara-negara Arab yang memiliki pangkalan-pangkalan militer AS. Sementara itu, peperangan yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia pun diawali dengan adanya isu keterlibatan NATO yang memprovokasi Ukraina untuk ikut bergabung, karena dinilai strategis sebagai wilayah untuk menjangkau jantung ibukota Rusia. Persaingan AS dan China dalam berbagai hal pun juga semakin memperumit posisi negara-negara lain dalam memainkan perannya di kancah internasional.

Indonesia dalam melakukan agenda-agenda Internasionalnya pun telah memainkan manuver yang cukup membuat kalangan baik dalam maupun luar negeri tersentak, seperti keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan BoP (Board of Peace). Keikutsertaan Indonesia dalam BoP menimbulkan polemik yang cukup lama dan mengakibatkan terjadinya pro dan kontra terutama di kalangan dalam negeri. Tidak mengherankan sikap Indonesia terhadap hubungan dengan negara-negara internasional menjadi kontraproduktif, dan tidak dianggap sebagai negara yang dapat dijadikan panutan dalam penyelesaian berbagai konflik dunia, hal ini terlihat ketika Indonesia menjadi Presidensi KTT G20 tahun 2022 tidak mampu mendamaikan

pihak-pihak yang berkonflik. Termasuk situasi ketegangan di Selat Hormuz, ketika kapal-kapal negara-negara Asia Tenggara diperkenankan melintasi selat tersebut, namun berbeda dengan kapal milik Indonesia yang sempat tertahan berbulan-bulan di kawasan tersebut.

Akibat terhambatnya kapal-kapal Indonesia di Selat Hormuz dalam memenuhi kebutuhan pasokan minyak, untungnya Indonesia berhasil membangun kerjasama strategis dengan pemerintah Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui pasokan minyak mentah (crude) dan pembangunan infrastruktur energi. mengamankan kerjasama strategis dengan pemerintah Rusia untuk memperkuat ketahanan



energi nasional, khususnya melalui pasokan minyak mentah (crude), LPG, fasilitas penyimpanan (storage), dan pembangunan infrastruktur energi, guna mengamankan cadangan energi di tengah dinamika global. Di samping itu, dalam kerjasama tersebut Pemerintah Indonesia mulai memperluas penjangkauan kerjasama pengembangan energi nuklir.

Namun di sisi lain, Indonesia juga menandatangani perjanjian kerjasama penelitian ilmiah dengan Ukraina yang saat ini jelas-jelas sedang bertikai dengan pihak Rusia. Kerjasama penelitian ini mencakup iklim, geologi, biodiversitas, hingga cuaca angkasa. Perjanjian Ukraina dan Indonesia ditandatangani pada 20 Agustus 2026 untuk meluncurkan penelitian ilmiah bersama yang menghubungkan ekosistem kutub dan tropis. Kemitraan tersebut ditandatangani oleh Pusat Ilmiah Antartika Nasional Ukraina/National Antarctic Scientific Center (NASC) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional



Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, dan diwakili secara langsung oleh Prof. Dr. R. Nunung Nuryantono (Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN) bersama Dr. Evgen Dykyi (Direktur NASC). Foto. Instagram Indonesiainkyiv

Indonesia (BRIN). Kerangka kerjasama selama lima tahun mencakup penelitian lapangan, pertukaran ilmuwan, dan berbagi data.

Proyek awal kerjasama dilakukan dengan sembilan proposal penelitian bersama yang diharapkan akan dimulai pada Desember 2026. Ilmuwan Indonesia berencana untuk melakukan

penelitian di stasiun Akademik Vernadsky Ukraina dan di atas kapal pemecah es penelitian "Noosphere". Memang secara akademis, ini terlihat seperti peluang besar bagi Indonesia dalam menyerap keunggulan teknologi suatu negara. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap risiko politik dan keamanan, mengingat bahwa kapal pemecah es Noosphere yang digunakan Ukraina diduga berpotensi dimanfaatkan



Foto. berbagai sumber



Foto. uac.gov.ua

untuk operasi intelijen atau bahkan penyelundupan berbagai jenis drone (UAV, USV, dan UUV). Kehadiran ilmuwan Indonesia di kapal tersebut bisa menyeret menjadi pihak tak sadar dalam aktivitas maritim ilegal.

Terlebih dalam suatu media internasional, NASC terlibat dalam suatu dugaan kasus korupsi pada bulan Desember 2024, yang dipimpin oleh Yevhen Dykyi atau sering ditulis Evgen Dykyi sebagai direktur NASC. Penyelidikan resmi saat itu dilakukan oleh State Bureau of Investigation (DBR) Ukraina terkait dugaan penyalahgunaan dana anggaran negara. Lebih jauh lagi, investigasi korupsi yang diprakarsai oleh anggota Verkhovna Rada Ukraina menetapkan bahwa Dykyi memiliki hubungan dan kontak yang erat dengan dinas rahasia Ukraina, khususnya Dinas Keamanan Ukraina (SSU). DBR menyelidiki kontrak pengadaan barang dan jasa senilai \$45,2 juta (sekitar 800 miliar rupiah lebih) yang dikeluarkan oleh NASC antara tahun 2017 hingga 2024. Penyelidik menemukan bahwa NASC di bawah kepemimpinan Yevhen Dykyi membeli barang dan kebutuhan logistik untuk ekspedisi Antartika (termasuk untuk operasional kapal pemecah es Noosphere) tanpa melalui proses tender terbuka (non-tender).

Selain sebagai direktur NASC Yevhen Dykyi dikenal sebagai komentator militer terkemuka di Ukraina. Ia adalah mantan

komandan Batalyon Aidar Nasionalis. Yevhen Dykyi yang lahir 28 Agustus 1973 adalah seorang ilmuwan Ukraina, veteran militer, dan komentator publik yang menjabat sebagai direktur Pusat Ilmiah Antartika Nasional Ukraina (NASC). Investigasi korupsi yang melibatkan kapal pemecah es "Noosphere" dan Yevhen Dykyi, kepala Pusat Ilmiah Antartika Nasional (NASC), jelas menandakan hilangnya kepercayaan terhadap transparansi program Antartika Ukraina.

Mengingat terbatasnya jumlah kapal Ukraina yang mampu berlayar di kondisi keras Antartika, kapal pemecah es "Noosphere" kemungkinan besar memiliki peralatan teknis yang dapat digunakan untuk operasi pengintaian dan intelijen, termasuk yang ditujukan terhadap Rusia. Pergerakan kapal "Noosphere" di perairan internasional yaitu antara pangkalan tetapnya (Cape Town, Afrika Selatan, yang dilayani oleh perusahaan "Trade Ocean Ships Agency Ltd.", manajer kapal David Joosty), pelabuhan pendaftarannya (Odessa, Ukraina), dan lokasi lain yang secara teratur dikunjungi (misalnya, di Republik Chili), memungkinkan pemantauan dan pemetaan rute pelayaran niaga Rusia dapat dilakukan tanpa hambatan.

Keikutsertaan warga negara Indonesia di atas kapal "Noosphere" berisiko menjadikan Indonesia sebagai pihak yang tidak disadari terlibat dalam aktivitas maritim ilegal Ukraina, sehingga

mengancam reputasi Jakarta baik di tingkat global maupun regional. Lebih jauh lagi, kejadian seperti itu akan merusak kebijakan netralitas Indonesia dan secara langsung berdampak pada momentum positif yang muncul dalam kemitraan strategis antara Jakarta dan Moskow. Menyeret Indonesia ke dalam proyek ini pada dasarnya adalah upaya mencari investor alternatif dengan kedok misi kemanusiaan dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, manfaat dan hasil nyata dari kerjasama dengan pihak Ukraina di bidang ini kemungkinan besar tidak akan memenuhi harapan Indonesia.

Indonesia sedang memainkan permainan diplomasi tingkat tinggi. Keputusan untuk memperkuat kerjasama energi dengan Rusia adalah langkah strategis yang tepat. Namun, keterlibatan dengan Ukraina harus ditimbang ulang dengan cermat. Diplomasi bukan sekadar soal ikut serta dalam proyek global, melainkan tentang melindungi kepentingan nasional, menjaga reputasi, dan memastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban dari konflik geopolitik yang bukan miliknya.

Indonesia selama ini dikenal dengan kebijakan politik bebas aktif. Netralitas bukan sekadar jargon, melainkan strategi untuk menjaga kredibilitas di mata dunia. Keterlibatan terlalu jauh dengan Ukraina berpotensi merusak momentum positif hubungan Jakarta–Moskow, terutama di sektor energi yang vital. Diplomasi Indonesia harus berani menolak keterlibatan praktis dalam proyek Antartika Ukraina jika terbukti berisiko. Menjaga reputasi dan kepentingan nasional jauh lebih penting daripada sekadar partisipasi simbolis dalam riset internasional.

Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif

Dalam Setengah Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat positif meski di tengah dinamika ekonomi. Pada Triwulan II 2026, Ekonomi Indonesia tumbuh

5,29%

secara tahunan (year-on-year)



Laju Pertumbuhan Ekonomi (year-on-year)



Foto: Magnific

MEMBANGUN BANGSA DIMULAI DARI KEJUJURAN PADA NIAT YANG DITOPANG OLEH PENEGAKAN HUKUM DAN BUDAYA MALU SEBAGAI PONDASI KEMAJUAN INDONESIA

Brigjen TNI Tomi Kaloko Utomo, M.Sc.

Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Sistem Manajemen Nasional



"Bangsa yang besar tidak dibangun oleh banyaknya aturan, melainkan oleh manusia-manusia yang jujur pada niatnya, berintegritas dalam tindakannya, taat pada hukum, dan memiliki rasa malu ketika berbuat salah."

Mengapa Sebagian Bangsa Maju dan Sebagian Lain Tertinggal?

Pertanyaan ini telah lama menjadi bahan kajian para ahli ekonomi, sosiologi, politik, dan sejarah. Sebagian menekankan pentingnya kekayaan alam, sementara yang lain menyoroti pendidikan, teknologi, stabilitas politik, atau sistem ekonomi. Semua faktor tersebut memang penting. Namun, sejarah menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan adalah kualitas manusianya.

Negara yang miskin sumber daya alam dapat menjadi maju apabila memiliki sumber daya manusia yang jujur, disiplin, berintegritas, dan menjunjung tinggi hukum. Sebaliknya, negara yang kaya sumber daya alam dapat tertinggal apabila nilai-nilai tersebut melemah.

Sesungguhnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar, yaitu kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis, serta falsafah bangsa yang luhur. Para pendiri bangsa telah meletakkan dasar negara melalui Pancasila dan menetapkan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan tersebut tidak akan tercapai hanya dengan membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan, atau gedung-gedung megah. Semua itu hanyalah sarana. Penentu keberhasilannya tetaplah manusia yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan memeliharanya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia bukan hanya berarti meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan penguasaan teknologi, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah membangun karakter.

Kebiasaan yang Salah Menjadi Kewajaran.

Pernahkah kita melihat trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki justru berubah menjadi tempat berjualan? Tidak berhenti di situ, sebagian badan jalan juga digunakan sebagai area parkir liar sehingga mempersempit ruang lalu lintas dan memperparah kemacetan. Persoalan tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab para pedagang atau oknum aparat. Kita sebagai masyarakat juga perlu bercermin. Setiap kali memilih membeli makanan atau berbelanja di lokasi yang melanggar aturan,

tanpa disadari kita ikut mempertahankan praktik tersebut agar tetap berlangsung. Tanpa adanya pembeli, pelanggaran semacam itu tidak akan memiliki daya tarik ekonomi.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam kehidupan politik, misalnya melalui praktik serangan fajar pada masa kampanye. Persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab para politikus atau tim suksesnya, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sebagai pemilih. Tidak sedikit pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan kedekatan pribadi atau keuntungan sesaat yang diterimanya, bukan atas pertimbangan kapasitas, integritas, dan kepentingan bangsa.

Dalam kehidupan beragama pun, penyimpangan dapat terjadi. Sebagian pihak memanfaatkan fanatisme pengikutnya demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Tidak jarang kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tetap dipertahankan karena telah dianggap sebagai tradisi atau kewajaran dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan secara berulang dapat berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dipelihara akhirnya diterima

sebagai sesuatu yang wajar, meskipun sesungguhnya bertentangan dengan hukum, etika, maupun nilai-nilai moral.

Dari Niat hingga Karakter: Mata Rantai yang Menentukan.

Karakter tidak terbentuk secara tiba-tiba. Ia lahir melalui proses yang panjang dan berkesinambungan.

Niat → Keputusan → Tindakan → Kebiasaan → Karakter → Budaya → Kualitas Bangsa

Rangkaian inilah yang menjadi akar dari berbagai persoalan bangsa. Banyak program pembangunan tidak mencapai hasil yang optimal bukan karena Indonesia kekurangan aturan atau kekurangan orang-orang yang cerdas, melainkan karena mata rantai tersebut telah mengalami penyimpangan sejak titik awalnya, yaitu niat.

Niat merupakan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi justru menjadi penentu arah setiap tindakan. Dua orang dapat melakukan pekerjaan yang sama, menggunakan prosedur yang sama, bahkan menghasilkan keluaran yang tampak serupa. Namun, apabila niat yang melatarbelakanginya berbeda, dampaknya terhadap organisasi maupun masyarakat dapat sangat berbeda.

Kejujuran: Lebih dari Sekadar Tidak Berbohong.

Kejujuran bukan sekadar tidak berbohong kepada orang lain. Kejujuran yang paling mendasar adalah kejujuran kepada diri sendiri mengenai niat di balik setiap tindakan. Oleh karena itu, setiap orang semestinya berani mengajukan satu pertanyaan sederhana sebelum mengambil keputusan:

"Untuk tujuan apa saya melakukan ini?"

Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat mendalam.

- Seorang pedagang perlu bertanya apakah usahanya dijalankan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat.
- Seorang aparatur negara perlu bertanya apakah kewenangan yang dimilikinya benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat.
- Seorang pemimpin perlu bertanya apakah setiap kebijakan yang diambil benar-benar ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi dan kepentingan bangsa, atau justru lebih

menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya.

- Seorang pendakwah perlu bertanya apakah setiap dakwah yang disampaikan bertujuan menyebarkan syiar agama atau lebih mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Apabila pertanyaan tersebut dijawab dengan jujur, banyak penyimpangan dapat dicegah sebelum terjadi. Namun, hati yang telah tertutup oleh kepentingan akan sulit menerima kebenaran, sekalipun kebenaran itu tampak jelas di hadapannya.

Niat dan Kejujuran Selaras dengan Pancasila.

Nilai kejujuran pada niat selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Setiap tindakan pada hakikatnya dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Setiap keputusan harus menghormati martabat manusia serta hak-hak orang lain.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Amanah dan kewenangan harus digunakan secara arif, bijaksana, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Setiap kebijakan dan tindakan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, kejujuran pada niat bukan sekadar nilai moral yang bersifat pribadi, melainkan juga merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesimpulan: Membangun Bangsa Dimulai dari Hati.

Pada hakikatnya, membangun bangsa tidak dimulai dari pembangunan fisik, melainkan

dari pembangunan hati dan karakter manusia. Ketika kejujuran pada niat menjadi fondasi, setiap tindakan akan lebih mudah diarahkan pada kepentingan bersama. Sebaliknya, ketika niat telah bergeser kepada kepentingan pribadi atau kelompok, penyimpangan etika sesungguhnya telah dimulai, meskipun mungkin belum melanggar hukum secara formal.

Karena itu, kejujuran pada niat harus ditopang oleh penegakan hukum yang adil dan konsisten serta budaya malu yang hidup dalam masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi. Kejujuran melahirkan integritas, penegakan hukum menjaga ketertiban dan keadilan, sedangkan budaya malu menjadi benteng moral yang mencegah seseorang melakukan penyimpangan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Inilah titik awal perubahan. Kita tidak perlu menunggu hadirnya sistem yang sempurna. Perubahan dapat dimulai dari diri sendiri melalui kejujuran pada niat, keberanian untuk selalu menguji tujuan di balik setiap tindakan, komitmen membangun budaya malu, dan kepatuhan terhadap hukum yang ditegakkan secara adil.

Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang maju semata-mata karena kekayaan alam yang dimilikinya, melainkan karena kualitas manusia yang mengelolanya. Bangsa yang dihuni oleh manusia-manusia yang jujur, berintegritas, taat hukum, dan memiliki budaya malu akan mampu mengubah setiap potensi menjadi kemajuan yang berkelanjutan.

Sebaliknya, bangsa yang kehilangan kejujuran pada niat, mengabaikan penegakan hukum, dan memudahkan budaya malu akan terus menghadapi berbagai persoalan, betapapun besar sumber daya yang dimilikinya.

Oleh sebab itu, membangun Indonesia pada akhirnya adalah membangun manusianya. Ketika manusia Indonesia memiliki niat yang lurus, karakter yang kuat, integritas yang kokoh, serta kesadaran untuk menegakkan hukum dan menjaga martabat dirinya, cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan semakin dekat untuk diwujudkan.

"Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang diambil dengan niat yang jujur."
(Tom Kal)



Lemhannas RI Sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Ancaman Perang Kognitif (*Cognitive Warfare*)

Kolonel Laut (P) Dr. Budhi Yuzerman, MAP., M.Tr.Opsla

Tenaga Ahli Pengajar Muda Bidang Iptek Lemhannas RI

LATAR BELAKANG

BBC News Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2026 menyebutkan bahwa hasil analisis media sosial dari Monash University Indonesia menemukan adanya pola teroganisir dan hampir mustahil dilakukan secara manual terkait beredarnya kembali video-video demonstrasi mahasiswa dengan sejumlah narasi, dengan menggunakan skrip, aplikasi otomatis, atau mekanisme *bulk retweet*, yang tujuannya untuk menaikkan engagement percakapan. Pola lain yang menonjol adalah struktur *seed-and-amplify*, yaitu sejumlah kecil akun membuat atau menyebarkan narasi awal, lalu ribuan akun lain me-retweet-nya.

Situasi diatas selaras dengan hasil penelitian Karyana dan kawan-kawan dari Universitas Pertahanan pada tahun 2025, yang menyebutkan bahwa media sosial saat ini telah berkembang menjadi domain strategis yang tidak hanya membentuk pola komunikasi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas

pertahanan nasional. Ruang digital ini telah dimanfaatkan oleh berbagai aktor negara, non negara, kelompok ekstremis, hingga proxy asing untuk melaksanakan perang informasi (*Information Warfare*) dan perang kognitif (*Cognitive Warfare*) yang bersifat asimetris, non linier, dan sulit terdeteksi.

Perang kognitif adalah model konflik modern yang menjadikan pikiran manusia sebagai medan pertempuran utama (*human mind as the new battlefield*). Berbeda dengan perang konvensional yang mengincar wilayah fisik, perang kognitif bertujuan merusak, memanipulasi, dan mengendalikan cara orang berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Dalam skala nasional, implementasi Perang Kognitif adalah adanya sejumlah disinformasi terkait isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sengaja dibingkai negatif lewat aksi fearmongering ekonomi guna mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan gizi nasional. Di skala global, taktik ini juga dilakukan oleh Amerika dan Israel melalui operasi penyesatan

strategis di kawasan Timur Tengah guna mendehumanisasi lawan, mengontrol arus informasi konflik, dan melindungi rencana militer mereka di dunia maya.

PEMBAHASAN

Istilah "cognitive warfare" pertama kali dicetuskan secara resmi di ranah militer pada tahun 2017 oleh Letjen Vincent Stewart (AS). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih dalam oleh pakar pertahanan seperti Francois dua Cluzel untuk NATO. Selanjutnya dengan meledaknya teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif, algoritma media sosial, dan ilmu saraf (neuroscience), perang kognitif bertransformasi dari sekadar penyebaran hoaks menjadi produksi massal disinformasi yang sangat personal dan otomatis.

Secara definisi (Kementerian Pertahanan dan NATO) menyebutkan bahwa Perang Kognitif adalah seni menggunakan teknologi untuk mengubah kognisi, persepsi, emosi, dan perilaku target manusia, baik individu pemimpin maupun populasi masyarakat,

Foto: [Kawant Haju/AFP]

Ilustrasi: Magnific

dan paling sering tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka, guna mendapatkan keuntungan strategis atau politik.

Dalam propaganda perang tradisional biasanya berusaha mendikte "apa" yang harus dipikirkan (*what to think*) dan bersifat searah, sedangkan Perang Kognitif berusaha memanipulasi "bagaimana" manusia memproses informasi dan berpikir (*how to think*) secara interaktif menggunakan algoritma psikologis.

Aktor perang kognitif menyerang "perangkat lunak" (otak dan psikologi) manusia dengan memanfaatkan bias kognitif dan emosi negatif. Beberapa strategi utamanya meliputi:

Eksploitasi Algoritma dan Gelembung Informasi (*Echo Chambers*), penyerangan dilakukan dengan menggunakan pasukan robot (bot) dan pembuat opini (*influencer*) untuk menggugah konten bermuatan emosional tinggi (marah, benci, takut). Taktik ini bertujuan mengunci target dalam pusaran informasi satu pihak sehingga tercipta polarisasi ekstrem.

Framing Isu dan Manipulasi Narasi (*Narrative Control*), dilakukan dengan cara membingkai suatu peristiwa nyata secara bias atau memutarbalikkan konteksnya. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap kelemahan atau kesalahan kecil dari sebuah institusi/ pemimpin, lalu memviralkannya secara masif untuk menghancurkan karakter (*character assassination*).

Disinformasi Massal Berbasis AI (*Deep-Fake*), yaitu dengan memproduksi video, audio, atau dokumen palsu yang sangat mirip asli menggunakan teknologi AI (*Artificial Intelligence*), dengan tujuan menciptakan kepanikan publik, kekacauan pasar finansial, atau merusak legitimasi pemilu dalam waktu singkat sebelum sempat di klarifikasi.

Operasi Psikologis Menguras Energi Mental (*Cognitive Overload*), yaitu dengan membanjiri ruang digital target dengan jutaan informasi kontradiktif, hoaks, dan teori konspirasi secara bersamaan, sehingga menyebabkan Masyarakat mengalami kepasrahan kognitif (*cognitive collapse*), dimana mereka menjadi sangat lelah, apatis dan akhirnya kehilangan kemampuan membedakan mana fakta dan mana opini.

Erosi Kepercayaan Sosial (*Subversion of Trust*), yaitu secara konsisten menyuntikkan narasi nihilism bahwa lembaga negara, sistem hukum, media massa resmi dan nilai-nilai luhur bangsa adalah produk gagal yang korup, ini bertujuan untuk memutus

ikatan sosial budaya sehingga dapat meruntuhkan Ketahanan Nasional tanpa perlu intervensi militer secara langsung.

Dalam lanskap Perang Hibrida Modern, menguasai ruang informasi dan pikiran publik kini dinilai sama pentingnya dengan menguasai wilayah teritorial. Senjata utamanya bukan lagi peluru, melainkan gawai di tangan masing-masing individu.

Akhir-akhir ini Perang Kognitif telah berkembang menjadi salah ancaman strategis modern yang berpotensi dapat menggagalkan pencapaian delapan visi Asta Cita Presiden. Jika ruang pikiran publik berhasil dirusak, maka fondasi utama Asta Cita, mulai dari Ideologi Pancasila, Ketahanan Ekonomi, Kualitas SDM, hingga penegakan hukum akan melemah, akibat polarisasi sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sehingga membangun pertahanan kognitif secara masif adalah langkah krusial yang urgen untuk dilakukan agar dapat melindungi pikiran masyarakat dari manipulasi informasi di era digital.

Dalam kerangka membangun pertahanan kognitif, maka eksistensi Lemhannas RI sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga, merawat dan meningkatkan nilai-nilai Ketahanan Nasional, dapat menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman terkait *Sensational Filter* (saring sebelum sharing), mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*Critical Thinking*), dan mendorong setiap individu untuk melakukan *Digital Detox* serta memahami Bias Kognitif Diri Sendiri, sehingga terbangun pertahanan kognitif di setiap individu anak bangsa.

Perang kognitif dapat menciptakan pelemahan sistemik pada seluruh aspek Tri Gatra (Aspek Alamiah) dan Panca Gatra (Aspek Sosial). Serangan kognitif terhadap nilai-nilai Astra Gatra merupakan upaya manipulasi psikologis dan penyebaran disinformasi secara terstruktur untuk merusak cara berpikir, keyakinan, dan loyalitas masyarakat terhadap ideologi serta identitas bangsa. Dalam konteks ketahanan nasional Indonesia, serangan ini menysar aspek Tri Gatra (geografi, demografi, kekayaan alam) dan Panca Gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan) dengan cara membenturkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan paham radikal atau liberal. Dampak utamanya adalah melemahnya ikatan sosial, memudarnya rasa nasionalisme, serta terciptanya polarisasi di masyarakat yang pada akhirnya meruntuhkan stabilitas dan kedaulatan negara dari dalam tanpa melalui perang fisik.

Lemhannas RI dapat menjadi lokomotif kebijakan pertahanan kognitif nasional, melalui inisiasi untuk merumuskan doktrin pertahanan kognitif nasional, dan mengintegrasikan materi pendidikan mengenai pencegahan radikalisme digital dan proxy war ke dalam sistem pendidikan yang sudah ada untuk melindungi ruang pikiran calon-calon pemimpin dan agen-agen perubahan yang dididik di Lemhannas, termasuk di level mahasiswa dan pelajar dalam giat *Goes To Campus* maupun *Goes To School*. Di samping itu Lemhannas dapat juga melakukan transformasi pendidikan kepemimpinan yang lebih adaptif digital, serta melakukan penguatan kajian strategis berbasis data (*Data Driven*) dengan mengoptimalkan sistem pengukuran Labkurtannas untuk memantau fluktuasi indeks ketahanan pada tiap-tiap gatra secara *real time*.

Melalui kegiatan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) yang berlevel global, Lemhannas RI dapat juga menjadikan wadah ini untuk merumuskan regulasi global terkait etika Kecerdasan Buatan (AI) dan Perlindungan Data Nasional, serta mendorong standardisasi tata kelola informasi geospasial dan digital nasional agar tidak mudah dimanipulasi atau disusupi oleh pihak luar.

KESIMPULAN/REKOMENDASI

Perang Kognitif merupakan ancaman asimetris modern yang berbahaya karena dapat memanipulasi ruang pikir dan merusak loyalitas ideologi masyarakat dan menciptakan polarisasi serta melemahkan stabilitas negara dari dalam. Sehingga Lemhannas RI memiliki poisisi krusial untuk dapat memimpin penguatan Ketahanan Mental Bangsa melalui kedudukannya sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional dan perumus kebijakan ketahanan nasional, melalui inisiasi penyusunan Doktrin Pertahanan Kognitif Nasional, serta memperkuat kurikulum pendidikan P4N/ P3N/PPNK dengan memasukkan aspek ketahanan nasional menghadapi perang kognitif.

REFERENSI

Cristoph Deppe dan Gary S.Schaal (2024), *Cognitive Warfare: a conceptual analysis of the NATO ACT cognitive warfare exploratory concept*, *Frontiers in Big Data, Cognitive Security Alliance, United States*.

Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Perang Informasi dan Kognitif Berbasis Media Sosial (2025), Rana dkk, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, Jilid 3 Nomor 2 (2025): Oktober-Desember, E-ISSN: 3025-6445.

Berita BBC News Indonesia Tanggal 4 Agustus 2026, Pukul 07.25 WIB, Mengapa Konten Demo Mahasiswa Yang Lama Ramai Lagi di Media Sosial? – 'Ada Pola Terorganisir dan Mustahil dilakukan Secara Manual', *Jurnal BBC News Indonesia Riana A Ibrahim*.

KOMJEN POL. DR. DRS.

GATOT TRI

SURYANTA, M.Si., CSFA

Sekretaris Utama Lemhannas RI

Bagi Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, perjalanan hidup tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Keinginan untuk menjadi tentara pada masa muda justru membawanya ke kepolisian. Cita-cita menjadi guru kemudian hadir di tengah perjalanan sebagai perwira Polri. Berbagai penugasan pun membawanya dari ruang penyidikan, konflik sosial, hingga misi kemanusiaan di luar negeri. Kini, pengalaman panjang tersebut menjadi bekal dalam menjalankan amanah sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI sejak 23 Juni 2026.

Gatot lahir di Bantul pada 14 April 1969 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara. Ayahnya, Supardjo Pramuhartono, S.Pd., berprofesi sebagai guru, sedangkan ibunya, Kastarini, merupakan seorang petani. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di lingkungan kampung yang pada masa itu masih dihadapkan pada berbagai persoalan sosial, khususnya maraknya perjudian yang merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Bagi Gatot, kondisi tersebut justru menumbuhkan keinginan untuk memperbaiki kehidupan. Keinginan serupa juga dirasakan oleh saudara-saudaranya. Namun, ia menyadari bahwa untuk mengubah keadaan tersebut dibutuhkan perjuangan dan usaha yang luar biasa. Kelima bersaudara itu sama-sama memiliki keinginan untuk masuk AKABRI, sementara Gatot sendiri sejak awal telah mengarahkan cita-citanya pada dunia militer.

"Saya itu ingin masuk tentara," ujarnya.

Namun, hasil seleksi membawa Gatot ke jalan yang berbeda. Ia lulus seleksi psikologi kepolisian dan akhirnya memilih untuk menjalani pendidikan



Foto. Humas Lemhannas RI



“Kerjakan Saja; Jika Kita Bekerja, Tuhan Pasti Melihat”

kepolisian. Pilihan tersebut tidak pernah menjadi rencana awalnya, tetapi kemudian menjadi jalan pengabdian yang dijalannya selama lebih dari tiga dekade.

Bagi Gatot, pengalaman itu menunjukkan bahwa cita-cita tidak selalu diwujudkan melalui jalan yang telah dibayangkan sejak awal.

“Kalau kita memiliki cita-cita yang kuat, memiliki usaha yang luar biasa dan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan mengabulkan dan mengizinkan hal itu, lho,” katanya.

Keinginan untuk memperbaiki kehidupan juga terlihat dari perjalanan pendidikannya. Gatot menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bantul. Untuk dapat masuk SMA Negeri 1 Bantul, ia sempat berpindah-pindah sekolah swasta sebelum mengikuti ujian NEM. Proses tersebut membuat masa SMA-nya berlangsung selama empat tahun, satu tahun lebih lama dari seharusnya.

Ia tidak menganggap tambahan waktu tersebut sebagai suatu persoalan. Baginya, jalan yang lebih panjang tetap layak ditempuh selama dapat membawanya ke tujuan.

“Akan tetapi, sekali lagi, hal itu saya lakukan karena saya ingin mengubah nasib,” tuturnya.

Sejak remaja, Gatot juga terbiasa berorganisasi. Bersama teman-temannya, ia aktif dalam Karang Taruna dan berbagai kegiatan positif di kampung. Mereka berusaha menunjukkan bahwa anak-anak muda di lingkungan tersebut dapat mengambil arah berbeda dari persoalan sosial yang ada di sekitar mereka.

Bertahun-tahun kemudian, ketika kembali ke kampung halaman, Gatot melihat sejumlah teman masa mudanya telah berubah. Mereka yang dahulu sama-sama berusaha memperbaiki kehidupan kini telah menjadi tokoh masyarakat.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Gatot sempat kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, Jurusan Matematika, melalui jalur PMDK. Masa kuliah tersebut tidak berlangsung lama. Saat itu, ia belum memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan dijalani setelah menyelesaikan pendidikan.

Pengalaman mengajar di bimbingan belajar Gadjah Mada Sukses di Yogyakarta kemudian memperkenalkannya pada dunia pendidikan. Gatot menikmati pengalaman tersebut karena selain dapat mengajar, ia juga sudah memiliki penghasilan meskipun masih berstatus mahasiswa. Dari sana, muncul cita-cita untuk menjadi guru.

Jalan hidup kembali membawanya ke arah yang berbeda. Gatot memilih kepolisian dan menjalani pendidikan sebagai bagian dari Akabri atau Akpol angkatan 1991, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Setelah lulus, keduanya sama-sama ditempatkan di Polda Metro Jaya.

Jakarta menjadi tempat Gatot belajar mengenali medan baru. Sebagai perwira muda, ia tinggal di kawasan Cawang dan menggunakan bus untuk menuju tempat tugas. Karena belum memahami rute di Jakarta, ia beberapa kali tersasar. Kesalahan-kesalahan kecil tersebut menjadi bagian dari proses beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda dari yang ada di Bantul.

Tidak lama kemudian, Gatot ditugaskan di Jakarta Timur. Di wilayah tersebut, ia mulai banyak bersentuhan dengan perkara kejahatan dan penanganan kasus yang menuntut ketekunan. Salah satu yang paling membekas adalah kasus pembunuhan Brigjen (Purn.) Tampubolon.

Kasus itu berlangsung dalam situasi yang tidak mudah. Banyak orang takut menjadi saksi, sementara barang bukti dibuang ke septic tank dan sejumlah saksi memilih pulang ke Jawa.

“Kasus itu memiliki sejarah yang tidak pernah terlupakan: seorang jenderal dibunuh oleh seorang preman, dan semua orang takut menjadi saksi,” kata Gatot.



Pelantikan Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si, CSFA sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI. (Foto. Humas Lemhannas RI)

Penyelidikan tetap berjalan hingga kasus tersebut berhasil diungkap.

“Namun, berkat kerja keras waktu itu, alhamdulillah semuanya bisa terungkap,” ujarnya.

Pengalaman sebagai penyidik kemudian membawanya ke medan tugas yang semakin beragam. Gatot pernah menjadi Danton Tar Akpol, Kasat Serse Polres Depok, kemudian menjalani berbagai penugasan di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Kariernya berkembang ke berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, dan hukum. Ia juga pernah mendapat penugasan di BPK RI sebagai Direktur Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum pada 2019, sebelum kemudian dipercaya sebagai Irwil V Itwasum Polri pada 2022 dan Kapolda Sumatera Barat pada 2024.

Perjalanan dari satu penugasan ke penugasan lain mempertemukan Gatot dengan persoalan yang semakin beragam. Di Sulawesi Utara, misalnya, ia menghadapi tawuran antarkampung yang berkembang hingga pembakaran rumah ibadah kelompok mayoritas dan minoritas.

Dalam situasi seperti itu, seorang pemimpin tidak selalu berhadapan dengan pilihan yang ideal. Setiap keputusan memiliki risiko, tetapi keputusan tetap harus diambil.

“Maka, pemimpin harus berani mengambil risiko,” ujarnya.

Gatot memahami bahwa keberanian tersebut harus disertai dengan pertimbangan. Setiap pilihan perlu dimitigasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ketika harus mengambil keputusan, ia menyadari bahwa pilihan terbaik terkadang hanya tersedia di antara sejumlah pilihan yang sama-sama tidak ideal.

“Ini adalah keputusan yang terbaik di antara pilihan-pilihan terjelek. Kalau keputusan ini dinilai sebagai suatu kegagalan, saya siap menerima risikonya.”

Bagi Gatot, keputusan seorang pemimpin juga tidak cukup berhenti pada pemberian instruksi. Kehadiran di lapangan menjadi bagian dari kepemimpinan itu sendiri.

“Kehadiran kita di lapangan juga sangat diperlukan agar anak buah merasa memiliki komandan atau pimpinan,” katanya.

Pengalaman Gatot kemudian meluas ke luar negeri. Ia pernah menjadi observer FPU di Sudan, menjalankan penugasan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, mengikuti penugasan di Belanda, serta terlibat dalam pengamanan pemilu luar negeri di Johor Bahru, Malaysia.

Salah satu pengalaman yang paling membekas datang pada 2023 ketika Gatot dipercaya menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Polri dalam misi kemanusiaan di Turki. Penugasan tersebut membawanya menghadapi

kondisi yang berbeda dari pengalaman dalam penanganan bencana di Indonesia.

“Saya pernah membawa kontingen relawan ke Turki. Penanganan bencana di luar negeri sangat berbeda dengan di Indonesia,” ujarnya.

Suhu mencapai minus 17 derajat Celsius. Tim juga harus menyesuaikan diri dengan prosedur yang berbeda. Pembangunan rumah sakit lapangan harus melalui asesmen dan verifikasi, termasuk memenuhi ketentuan lingkungan. Penggunaan K-9 untuk pencarian korban pun memiliki aturan tersendiri.

Pengalaman tersebut memberikan perspektif baru bagi Gatot dalam menangani bencana. Berbekal pengalaman yang diperolehnya, ia kemudian menerapkan berbagai pembelajaran tersebut ketika menghadapi sejumlah bencana di Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Berdasarkan pengalaman tersebut, termasuk saat di Aceh dan Sumatera Barat, semuanya memberikan pandangan baru bagi saya,” katanya.

Peristiwa tsunami di Aceh serta gempa bumi di Turki menjadi pengalaman berharga yang semakin memperkaya pemahamannya dalam penanganan bencana alam. Berbagai pengalaman tersebut turut membentuk perspektif dan memudahkannya dalam menghadapi situasi serupa di kemudian hari.

Dalam kondisi bencana, tutur Gatot, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama. Namun, proses penanganan kerap berlangsung dalam berbagai keterbatasan, termasuk ketika bencana terjadi pada penghujung tahun saat anggaran pemerintah daerah hampir habis. Situasi seperti ini menuntut upaya, kesiapan, dan kerja keras yang lebih besar dari seluruh pihak yang terlibat.

Kondisi tersebut juga menuntut pengambilan keputusan secara cepat serta koordinasi yang kuat lintas pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, penanganan bencana tidak terlepas dari kerja sama dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), serta dukungan penuh dari Kapolri

Cahyaqadri Hildamona Permatasari, S.Si., M.Si.

Jalani Amanah dengan Tanggung Jawab

Menjadi aparatur sipil negara sebenarnya bukan cita-cita yang sejak awal direncanakan oleh Cahyaqadri Hildamona Permatasari, yang akrab disapa Mona. Keputusan tersebut berawal dari harapan orang tuanya. Seiring perjalanan kariernya hingga menjadi bagian dari Lemhannas RI, Mona pun memahami bahwa pekerjaan yang dijalani adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Apakah ini jalan hidup untuk saat ini? Berarti Iya. Maksudnya, ini kan sebenarnya kita yang mendaftar. Begitu sudah diterima, ini jadinya amanah dan tanggung jawab. Jadi, saat ini kita coba jalani aja amanah dan tanggung jawab ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Prinsip tersebut tidak terlepas dari pesan yang selalu diingatnya dari sang ayah. Almarhum ayahnya kerap mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan harus diselesaikan dengan tuntas dan semaksimal mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Mona lahir dari keluarga perantau asal Minang. Sejak kecil hingga menempuh pendidikan tinggi, ia tinggal di kawasan Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Al Azhar Kebayoran Lama, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 19 Jakarta dan SMA Negeri 6 Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Mona melanjutkan studi sarjana dan pascasarjana di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta.

Meski berasal dari keluarga Minang, kehidupan dan pendidikan Mona di rumah juga banyak diwarnai oleh budaya Jawa. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan kerja sang ayah yang banyak dikelilingi rekan-rekan dari suku

Jawa. Ia masih mengingat kebiasaan yang diterapkan ayahnya di rumah. Salah satunya ketika dipanggil, Mona terbiasa menjawab dalem, yang merupakan ungkapan sopan kata “iya” dalam budaya Jawa. Kebiasaan tersebut bahkan pernah menjadi bahan candaan teman-temannya di sekolah.

“Dulu saya inget waktu inget klo dipanggil Mona harus jawabnya “dalem”. Itu pernah diledek-in sama temen2 di sekolah kok jawabnya “dalem” itu sih”, ujarnya sembari tertawa.

Masa remajanya, menurut Mona, berjalan seperti kebanyakan remaja lainnya. Ia tidak banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Namun, ketika duduk di kelas satu dan dua sekolah menengah, ia mengikuti kursus bahasa Inggris atas dorongan ibunya. Menurut sang ibu, kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu bekal penting untuk masa depan.

Pilihan Mona untuk melanjutkan pendidikan di LSPR juga bukan sesuatu yang direncanakan sejak jauh hari. Ketika siswa lain mulai menentukan pilihan jurusan dan perguruan tinggi, ia mengaku belum memiliki gambaran pasti mengenai bidang yang ingin ditekuninya. Namun, sebuah kunjungan ke sejumlah kampus mengubah pandangannya. Salah satu kampus yang dikunjungi adalah LSPR. Sejak pertama kali datang, Mona langsung tertarik dengan kampus tersebut.

“Dari awal sudah tertarik di London School (LSPR) itu,” ujarnya.



Ketertarikannya pada dunia komunikasi semakin berkembang selama masa perkuliahan. Lingkungan akademik dan pengalaman belajar dari dosen-dosen yang juga merupakan praktisi komunikasi membuat Mona semakin tertarik pada bidang tersebut, khususnya public relations. Meski demikian, pekerjaan pertama dan kedua setelah lulus belum berkaitan langsung dengan bidang kehumasan.

Pekerjaan pertama Mona adalah staf pada Project Management Unit dalam proyek peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, program kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan World Bank. Selama kurang lebih tiga tahun, ia bekerja dalam ritme yang cukup cepat karena proyek tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Meski demikian, ia merasa nyaman menjalani pekerjaan tersebut karena didukung oleh lingkungan kerja yang suportif serta kesempatan untuk terus belajar.

Menjelang proyek berakhir, Mona bergabung dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang merupakan salah satu lembaga bentukan hasil proyek tersebut. Namun, ia hanya bekerja di sana selama sekitar enam bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil.

Keputusan untuk mengikuti seleksi PNS pada awalnya dilatarbelakangi oleh keinginan orang tua. Sang ayah yang bekerja di BUMN justru berharap anaknya menjadi PNS.

“Jujur, motivasi awal karena keinginan orang tua, berusaha memenuhi harapan orang tua,” katanya.

Masa awal sebagai ASN diwarnai oleh sejumlah pengalaman yang masih diingat hingga kini. Salah satunya adalah saat mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jatinangor. Setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hingga sore hari, para peserta masih menjalani kegiatan baris-berbaris hingga pukul 21.00. Pengalaman tersebut menjadi bagian yang membekas dalam perjalanan awalnya sebagai ASN.

Setelah bergabung sebagai CPNS di Biro Humas, Mona langsung terlibat dalam

berbagai kegiatan besar, termasuk saat Lemhannas RI menjadi tuan rumah Bakohumas se-Indonesia dan menyelenggarakan Eagle Award. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika Kepala Biro Humas saat itu mendorongnya untuk mencoba menulis opini di media massa. Meski sempat ragu karena merasa kemampuan dan pengetahuannya belum cukup, dorongan tersebut menjadi pengalaman penting dalam proses belajarnya.

Opini pertamanya tersebut dimuat di Media Indonesia, yang saat itu memiliki kerja sama dengan Lemhannas RI. Topik yang diangkat berkaitan dengan pajak dan nasionalisme, mengikuti isu yang sedang menjadi perhatian publik pada saat itu.

Bagi Mona, prinsip menjalankan amanah tidak hanya berlaku dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Menjadi ASN sekaligus seorang istri dan ibu dari dua anak membuatnya ini harus menjalankan berbagai peran secara bersamaan.

Namun, ia tidak memandang keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sebagai sesuatu yang harus selalu dibagi secara sama rata setiap hari. “Kadang ada hari dimana hari ini saya ke pekerjaan 40%, ke keluarga 60%, tapi di hari besoknya saya mungkin ke pekerjaan 60% dan sebaliknya, jadi tetap berusaha untuk menjalankan tanggung jawab itu tapi kita sendiri yang bisa tahu yang mana yang prioritas pada saat itu,” katanya.

Yang terpenting, menurut Mona, adalah memahami prioritas yang harus didahulukan dalam situasi tertentu. Mona bersyukur memiliki support system yang mendukung, baik di rumah maupun di lingkungan kerja. Dukungan keluarga, rekan kantor, dan teman-teman membuatnya dapat menjalankan berbagai tanggung jawab tersebut secara bersamaan.

Di tengah berbagai tantangan, Mona memandang profesi ASN sebagai sebuah tanggung jawab moral yang besar. Selain dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan, ASN juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat karena tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Karena itu, setiap tugas harus dijalankan dengan amanah.

Dalam menjalankan tugasnya saat ini, Mona juga turut membantu penyusunan paparan Gubernur Lemhannas RI. Keterlibatan tersebut menjadi kesempatan baginya untuk terus belajar dari berbagai tugas yang diberikan kepadanya. Baginya, pekerjaan yang dilakukan sebaiknya memiliki nilai tambah, bukan hanya bagi organisasi dan masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan dirinya. “Kalau bisa, dalam bekerja ada nilai tambah atau added value yang bisa saya berikan ke luar dan ke diri saya juga, serta belajar dari tiap pekerjaan yang ditugaskan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Biro Humas Lemhannas RI, Mona berharap dapat berkontribusi bagi unit kerja maupun Lemhannas RI secara keseluruhan. Ia berharap Biro Humas dapat semakin proaktif dan edukatif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, tugas humas tidak hanya berhenti pada proses penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.

“Informasi tentang kinerja yang kita berikan kepada masyarakat bisa benar-benar dipastikan sampai atau diterima, bukan hanya sebatas informasinya sudah dikirimkan,” katanya.

Mona melihat perubahan positif dalam keterbukaan Lemhannas RI kepada publik. Salah satu pengalaman yang masih diingatnya adalah saat Lemhannas RI mengadakan kegiatan “Ngopi Bareng Influencer” pada 2019.

Dalam kegiatan tersebut, salah satu influencer yang hadir adalah penulis Moammar Emka. Ketika diminta menyampaikan pandangannya mengenai Lemhannas RI, Moammar mengatakan bahwa sebelumnya ia menganggap Lemhannas sebagai lembaga yang “angker”. Namun, pandangan tersebut berubah ketika melihat Lemhannas RI telah hadir di media sosial dan mulai membuka diri kepada publik.

Bagi Mona, perubahan tersebut menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat semakin mengenal Lemhannas RI. Keterbukaan informasi dapat membantu publik memahami tugas, fungsi, serta kinerja yang dilakukan oleh Lemhannas RI. Meski wewenang Lemhannas RI tidak beroperasi dalam ranah pelayanan publik sehari-hari, Mona berharap publik tetap dapat memahami kontribusi Lemhannas RI terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. (MDF/CHP)



Foto. BPPI Setpres/Muchlis Jr

Lawatan ke Rusia, Prabowo Gagas Rute Langsung & Tegaskan RI Nonblok

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Federasi Rusia, sebagai tamu kehormatan utama atas undangan langsung dari Presiden Vladimir Putin. Kunjungan kenegaraan yang berlangsung pada 2 hingga 3 September 2026 ini menjadi momentum krusial untuk mempererat kemitraan strategis kedua negara, memperluas kerja sama ekonomi secara komprehensif, serta menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di kancah global.

Rangkaian kegiatan utama dimulai pada Kamis (3/9/2026) melalui pertemuan bilateral dalam format working lunch bersama Presiden Putin. Dalam kesempatan tersebut, Putin memuji Indonesia sebagai mitra paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Putin menyoroti lonjakan volume perdagangan bilateral sebesar 12 persen pada tahun lalu dan menegaskan fokus pengembangan kerja sama pada sektor pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, hingga energi nuklir. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Rusia adalah mitra yang sangat penting, di mana hubungan diplomatik yang telah berlangsung lebih dari lima dekade kini telah meningkat menjadi kemitraan strategis.

Saat menyampaikan pidatonya di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku usaha di Far Eastern Federal University (FEFU), Presiden Prabowo menekankan filosofi

pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan rakyat. Selaras dengan tema forum, "The Far East: Development for the Benefit of People", Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir elit.

"Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga biasa: apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, apakah petani dapat memperoleh pupuk dan menjual hasilnya dengan harga adil, serta apakah kaum muda mendapatkan pekerjaan produktif," tegas Presiden Prabowo. Visi tersebut sejalan dengan program prioritas nasional Indonesia seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, ketahanan energi, dan percepatan hilirisasi industri.

Di ranah ekonomi, Kepala Negara menargetkan pelipatgandaan nilai perdagangan bilateral yang pada 2025 telah menyentuh hampir 5 miliar dolar AS. Untuk mewujudkannya, Prabowo mendorong pemanfaatan optimal Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (EAEU). Perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Juli 2026 dan ditargetkan berlaku pada awal 2027 ini mencakup penghapusan bea atas lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan.

Untuk menopang lonjakan aktivitas ekonomi tersebut, Presiden secara spesifik mendesak pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia. Konektivitas langsung ini dinilai

krusial untuk menciptakan biaya logistik yang dapat diprediksi serta meningkatkan volume pariwisata. Prabowo juga mendorong sinergi pembiayaan antara lembaga investasi Indonesia, Danantara, dengan *Russian Direct Investment Fund* (RDIF) agar segera beralih dari penjajakan menuju eksekusi pembiayaan proyek strategis yang nyata.

Di hadapan delegasi internasional, Presiden Prabowo turut menyoroti tantangan fragmentasi global di mana perdagangan dan sistem keuangan kerap dijadikan senjata politik. Mengutip falsafah "gotong royong" dan pepatah Rusia "Odin v pole ne voyn" (tidak ada kemenangan jika berjuang sendiri), Prabowo mengajak komunitas internasional untuk membangun jembatan kerja sama ekonomi yang inklusif ketimbang membangun tembok pemisah.

Prabowo menutup pidatonya dengan ketegasan terkait posisi geopolitik Indonesia. Ia memastikan bahwa Indonesia konsisten memegang prinsip nonblok—tidak bergabung dalam pakta militer mana pun dan tidak memihak kepada satu kekuatan untuk menjatuhkan pihak lain. Posisi ini disambut baik oleh Presiden Putin, yang mengakui bahwa postur strategis Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar sekaligus kekuatan ekonomi utama di dunia menjadikannya aktor global yang kebijakannya sangat diperhitungkan oleh komunitas internasional. (DA/MDF)

Sumber: BPPI Setpres

Kabar bersejarah dan membanggakan datang dari dunia olahraga Tanah Air setelah Jonatan Christie resmi menduduki peringkat satu dunia tunggal putra Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) pada pembaruan ranking per 25 Agustus 2026. Pencapaian luar biasa ini memastikan pemain yang akrab disapa Jojo tersebut berada di puncak persaingan bulu tangkis global dengan koleksi 87.631 poin, mengungguli tipis dua pesaing terdekatnya, Christo Popov dari Prancis (87.002 poin) dan Kunlavut Vitidsarn asal Thailand (86.915 poin). Pergeseran takhta ini terjadi sekaligus menggeser pebulu tangkis asal Tiongkok, Shi Yu Qi, dari posisi puncak klasemen.

Keberhasilan Jonatan menyandang status sebagai pemain nomor satu dunia tidak lepas dari konsistensinya dalam mengharumkan nama Indonesia di berbagai turnamen bergengsi sepanjang musim 2026. Meski langkahnya sempat terhenti oleh Rasmus Gemke di babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, akumulasi poin Jojo tetap tak terkejar berkat rentetan performa stabilnya pada paruh pertama musim. Ia tercatat sukses menembus semifinal Malaysia Open 2026,

final India Open 2026, hingga melaju ke perempat final Kejuaraan Asia dan China Open 2026. Predikat nomor satu ini seakan menjadi mahkota penyempurna dari dedikasi panjangnya sebagai wakil Merah Putih, melengkapi deretan prestasi prestisius sebelumnya seperti medali emas Asian Games 2018, juara All England, gelar Kejuaraan Asia, hingga kontribusinya dalam membawa pulang Piala Thomas.

Bagi Indonesia, momentum ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena berhasil mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun di sektor tunggal putra. Sebelum pencapaian luar biasa Jojo ini, legenda bulu tangkis Indonesia terakhir yang mampu bertengger di peringkat satu dunia adalah Taufik Hidayat pada tahun 2000. Kembalinya tunggal putra Indonesia ke tahta tertinggi BWF membuktikan bahwa sistem pembinaan dan mentalitas juang atlet nasional masih sangat kuat, relevan, dan mampu bersaing di tengah dominasi atlet Tiongkok serta kebangkitan pemain-pemain Eropa saat ini.

Dampak dari pencapaian ini tidak hanya dirasakan di atas lapangan, tetapi juga meluas ke seluruh ekosistem olahraga

nasional. Posisi puncak yang diraih Jonatan memberikan suntikan moral dan kebanggaan nasional yang luar biasa bagi seluruh masyarakat pencinta bulu tangkis di Indonesia. Lebih dari itu, pencapaian bersejarah ini menjadi standar emas sekaligus motivasi konkret bagi para atlet muda di Pelatnas PBSI untuk terus mengejar kejayaan di kancah internasional. Kehadiran sosok panutan aktif yang menempati peringkat satu dunia diyakini akan memicu regenerasi pebulu tangkis yang lebih tangguh, berani bermimpi besar, dan memiliki rasa percaya diri tinggi di tingkat global.

Kini, tantangan terbesar bagi Jonatan Christie adalah mempertahankan konsistensi performa di sisa turnamen musim ini agar posisinya di puncak klasemen tidak digeser oleh para pesaingnya yang tertinggal dengan selisih poin yang sangat tipis. Dengan ketatnya rivalitas tunggal putra global, keberhasilan Jonatan telah membuktikan bahwa dedikasi, kerja keras, dan kebanggaan membawa lambang negara di dada merupakan kunci utama untuk mencetak sejarah baru bagi kejayaan bulu tangkis Indonesia. (DA/MDF)

Sumber: Berbagai Sumber

Takhta Tertinggi Merah Putih, Jonatan Christie Peringkat 1 Dunia



Foto. PP PBSI

Foto. Dokumen Penelitian BRIN

Pesona Jingga dari Pegunungan Poso: Mengenal *Rhododendron yombuwurii*, Flora Baru Indonesia

Hutan hujan tropis Indonesia seakan tak pernah kehabisan kejutan botani bagi dunia. Terbaru, para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama tim gabungan lintas institusi meluncurkan kabar gembira tentang penemuan spesies tumbuhan hias baru bernama ilmiah *Rhododendron yombuwurii*. Flora cantik berbunga oranye terang ini ditemukan di kawasan Pegunungan Tokorondo, Poso, Sulawesi Tengah, dan resmi dipublikasikan pada jurnal internasional Taiwania.

Uniknya, perjumpaan pertama tim peneliti dengan tumbuhan ini justru diawali oleh ketidaksengajaan. Pada Juni 2023, spesies ini pertama kali terlihat bukan di pedalaman hutan perawan, melainkan sebagai tanaman hias yang dipelihara di area wisata Air Terjun Saluopa, Tentena. Setelah ditelusuri, spesimen tersebut ternyata merupakan tanaman epifit yang sempat jatuh dari pepohonan tinggi di hutan Pegunungan Tokorondo pada ketinggian 1.000–1.800 meter di atas permukaan laut, lalu diselamatkan dan dirawat oleh warga setempat.

Secara morfologis, *Rhododendron yombuwurii* tumbuh sebagai semak epifit ramping yang menempel pada batang pohon. Bunganya berbentuk

corong sempit dengan warna oranye menyala yang sangat memikat mata. Meskipun berkerabat dekat dengan *Rhododendron celebicum*, spesies baru ini memiliki beberapa perbedaan yang mencolok. Jika *R. celebicum* dikenal memiliki bunga berukuran besar dengan warna merah muda hingga merah yang menggantung ke bawah, *R. yombuwurii* tampil lebih mungil dengan susunan bunga yang mengarah semi-tegak serta helai daun yang jauh lebih kecil.

Untuk memastikan keabsahannya, tim BRIN mengombinasikan pengamatan morfologi dengan teknologi canggih. Struktur sisik daun mikroskopisnya diuji menggunakan mikroskop elektron Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope (FIB-SEM) Aquilos 2 di Laboratorium Genomik BRIN Cibinong. Analisis molekuler DNA pada wilayah ITS (Internal Transcribed Spacer) juga dilakukan untuk membuktikan garis evolusinya yang khas.

Keberadaan flora unik ini membawa berbagai manfaat penting. Dari sisi hortikultura, bunganya yang berwarna jingga memikat dan berpotensi menjadi koleksi tanaman hias bernilai tinggi atau bahan pemuliaan untuk persilangan guna menghasilkan

spesies baru. Di alam liar, spesies epifit ini berfungsi sebagai indikator alami kesehatan ekosistem; kehadirannya menandakan kondisi hutan pegunungan Poso yang masih bersih, lembap, dan terjaga dengan baik. Selain itu, seperti kerabat *Rhododendron* lainnya, tanaman ini membuka peluang riset mendalam terkait potensi kandungan senyawa bioaktifnya untuk keperluan medis di masa depan.

Nama spesies *yombuwurii* sendiri disematkan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum Pendeta Yumbu Wuri, seorang tokoh adat dan masyarakat Suku Pamona yang gigih memperjuangkan kelestarian keanekaragaman hayati di Poso semasa hidupnya.

Saat ini, lembaga konservasi dunia (IUCN) mengategorikan *Rhododendron yombuwurii* dalam status Data Deficient (DD) karena populasinya di alam belum terdata secara menyeluruh. Kendati demikian, penemuan bunga jingga ini menjadi bukti nyata bahwa bentang alam pegunungan Sulawesi masih menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang menanti untuk dipelajari dan dilindungi. (DA/MDF)

Sumber: Berbagai sumber

Di dunia fiksi maupun kebudayaan populer, ngengat kerap kali disematkan dengan reputasi yang suram. Budaya populer sering menggambarkan sebagai pembawa kabar buruk atau simbol kematian, seperti halnya spesies yang digunakan sebagai jejak kejahatan dalam film-film misteri berlatar gelap. Namun, di balik stigma tersebut, dunia nyata menceritakan kisah yang jauh berbeda. Di balik sayapnya yang mungkin tidak secemerlang kerabatnya di siang hari, ngengat adalah pahlawan nokturnal yang diam-diam menjaga keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, kekayaan alam ini baru saja disingkap lebih dalam melalui penemuan dua spesies ngengat endemik baru pada awal Maret 2026, yang masing-masing diberi nama ilmiah *Glyphodella fojaensis* dan *Chabulina celebesensis*.

Dideskripsikan oleh tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), temuan ini bukan sekadar menambah panjang daftar keanekaragaman hayati nusantara, melainkan membawa kejutan besar bagi

peta biogeografi dunia. Sebelumnya, genus *Glyphodella* diyakini para ilmuwan hanya berdiam di kawasan tropis Afrika. Kehadirannya yang tiba-tiba di ujung timur Indonesia memunculkan hipotesis baru tentang kemungkinan sebaran lintas benua di masa lampau yang didorong oleh dinamika iklim dan arus angin. Di sisi lain, penemuan *Chabulina celebesensis* di wilayah tengah Nusantara berhasil mengisi kekosongan data katalog biologi selama lebih dari satu abad, mengingat spesies terakhir dari genus tersebut di Indonesia dicatat 143 tahun lalu.

Proses penemuan dua spesies ini menuntut ketekunan dan dedikasi waktu yang panjang. Survei lapangan dilakukan sejak tahun 2002 hingga 2017 dengan memanfaatkan lampu jebak untuk mengumpulkan spesimen yang beraktivitas di bawah bayang malam. Dari penjelajahan ini, diketahui bahwa *Glyphodella fojaensis* menetap di pedalaman hutan tropis primer yang masih perawan di Pegunungan Foja, di cekungan Sungai Mamberamo, Papua. Sementara itu, *Chabulina celebesensis* ditemukan mendiami kawasan hutan

tropis sekunder yang tersebar di berbagai titik di Sulawesi, membuktikan status pulau tersebut sebagai pusat evolusi dan konservasi yang bernilai tinggi.

Dari segi morfologi, identifikasi kedua ngengat ini sangat bergantung pada struktur fisik mikroskopis yang rumit. *Glyphodella fojaensis* memiliki karakteristik visual berupa bercak kuning bundar pada sayap depannya dan dapat dibedakan melalui struktur reproduksi jantan yang memiliki tonjolan punggung khusus. Sebaliknya, *Chabulina celebesensis* memikat perhatian dengan hilangnya bintik hitam pada ujung sayap depan, serta sayap belakang yang memancarkan warna kuning keemasan berhias garis-garis melengkung yang tegas. Pola-pola adaptasi morfologis inilah yang menjadi kunci pemisah identitas spesies di tengah keragaman fisik ordo Lepidoptera.

Meskipun kerap dianggap kusam dan tidak semenarik kupu-kupu, ngengat yang populasinya mendominasi 85 persen dari ordo serangga bersayap bersisik ini mengemban fungsi ekologis yang sangat vital. Mereka berperan penting sebagai agen penyerbuk utama bagi flora yang mekar pada malam hari. Di luar fungsi polinasi, ngengat merupakan fondasi rantai makanan yang menyuplai kebutuhan protein bagi kelelawar, burung, dan reptil, serta dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Lebih jauh lagi, eksistensi ngengat merupakan bioindikator keasrian alam yang sangat sensitif; fluktuasi populasi mereka sering kali menjadi alarm paling awal atas kerusakan lingkungan. Dengan sifatnya yang sangat endemik dan terbatas secara geografis, keberadaan spesies baru ini sangat rentan terhadap ancaman deforestasi, sehingga perlindungan mutlak terhadap hutan tropis Papua dan Sulawesi menjadi harga mati untuk melestarikannya. (DA/MDF)

Sumber: berbagai sumber

Dua Ngengat Baru di Jantung Nusantara



Foto. Dok BRIN

Bawa Nama Institusi, Atiatul Huda Raih Predikat Akademik Terbaik P4N 69

"Setiap datang ke kelas saya tidak boleh kosong, mesti ada isinya."

Kalimat itu menjadi prinsip Atiatul Huda, S.H., selama menjalani Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 69 Lemhannas RI. Prinsip tersebut pula yang mendorong Atiatul untuk selalu mempersiapkan diri sebelum mengikuti setiap sesi pembelajaran.

Bagi Kepala Bagian Dukungan Administrasi, Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan

Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, ruang kelas bukan sekadar tempat menerima materi. Setiap kesempatan belajar menjadi ruang untuk memberikan kontribusi sekaligus membawa nama institusi yang diwakilinya.

Motivasi itu sudah tumbuh sejak awal mengikuti pendidikan. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2003 tersebut ingin membawa nama baik Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun, semangat tersebut semakin kuat setelah Atiatul bertemu dengan peserta dari TNI, Polri, dan berbagai latar belakang lainnya.

"Saya melihat betapa hebatnya mereka, dan itu semakin memacu semangat saya supaya kalau setiap datang ke kelas itu saya nggak boleh kosong, mesti ada isinya," ujar Atiatul.

Keinginan untuk selalu hadir dengan persiapan membuat Atiatul mengalokasikan sebagian besar waktunya selama enam bulan untuk mempersiapkan tugas dan menyelesaikan pekerjaan akademik. Proses tersebut dijalani dengan disiplin, sementara kebersamaan dengan peserta lain di mess menjadi ruang untuk saling menguatkan.

Dukungan keluarga turut menjadi sumber energi selama pendidikan. Doa dari orang

tua, suami, anak-anak, dan keluarga membantu Atiatul mempertahankan semangat menghadapi padatnya aktivitas akademik.

"Doa orang tua, suami, anak-anak, keluarga semuanya menjadi bahan bakar yang membuat saya semakin semangat di kelas selama pendidikan," ungkapnya.

Tantangan terbesar datang dari banyaknya tugas dengan standar akademik yang tinggi serta lingkungan belajar yang berbeda dari pengalaman sebelumnya. Atiatul juga harus beradaptasi dengan para pengajar dari kalangan jenderal TNI dan Polri.

Namun, berbagai tantangan tersebut perlahan dipandang sebagai peluang. Kesempatan belajar bersama peserta dan pengajar dari berbagai latar belakang memberikan pengalaman yang menurut Atiatul jauh lebih berharga dibandingkan tantangan yang dihadapi.

"Tantangan paling berat itu tugasnya sangat banyak dengan standar yang sangat tinggi. Ada budaya yang berbeda dan di awal pasti membutuhkan penyesuaian. Tapi di luar itu, ini kesempatan yang amat sangat berharga. Akhirnya saya melihat ini lebih ke peluangnya dibandingkan tantangannya," jelas Atiatul.

Ketika predikat Akademik Terbaik P4N Angkatan 69 diumumkan, Atiatul mengaku tidak menyangka. Rasa bangga dan syukur muncul bersamaan. Penghargaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas proses pendidikan yang telah dijalani bersama pimpinan dan seluruh pengajar Lemhannas RI.

"Bangga luar biasa seperti mukjizat. Saya tidak menyangka. Saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan sekolah di sini," ujarnya. (AMT/MDF)



Mendapat Predikat Taskap Terbaik Sonny Tampubolon Dorong Legalitas Pertambangan Emas Rakyat

Persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) tidak selalu sederhana. Di satu sisi, aktivitas tersebut melanggar ketentuan hukum. Di sisi lain, PETI menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Kombes Pol Sonny Marisi Nugroho Tampubolon, S.I.K. ketika bertugas di Papua Barat.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi pijakan Sonny dalam menyusun Kertas Karya Perseorangan (Taskap) berjudul "Penguatan Regulasi Pertambangan Emas Rakyat Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Nasional". Karya tersebut mengantarkan Sonny meraih predikat Taskap Terbaik pada Program Pendidikan Pementapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 69 Lemhannas RI.

Sebelum mengikuti pendidikan, Sonny pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat. Dalam tugas tersebut, Sonny berhadapan langsung dengan persoalan PETI di wilayah Papua Barat. Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi bagian dari tugas, tetapi pada saat yang sama muncul persoalan sosial yang tidak dapat diabaikan.

"Masyarakat di sana juga sangat tidak sejahtera. Pendapatan utamanya dari hak ulayat orang yang menambang PETI ini. Tapi secara aturan, itu tidak boleh," ujar Sonny.

Kondisi tersebut mendorong Sonny melihat persoalan PETI dari perspektif yang lebih luas. Penindakan hukum tetap diperlukan, tetapi penyelesaian persoalan tidak cukup berhenti pada penegakan hukum. Menurut Sonny, diperlukan perubahan regulasi agar kegiatan pertambangan emas rakyat dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Gagasan tersebut bahkan telah dibawa Sonny dalam pembahasan dengan Komisi III DPR RI bersama Kapolda Papua Barat saat itu. Salah satu persoalan yang

dihadapi adalah tata ruang, mengingat banyak lokasi pertambangan emas berada di kawasan hutan lindung. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu tantangan dalam mendorong legalisasi aktivitas pertambangan rakyat.

Dalam penyusunan Taskap, pengalaman langsung tersebut menjadi modal penting. Sonny menggunakan pengalaman selama bertugas di Papua Barat sebagai basis penelitian, kemudian memperluas analisis dalam konteks nasional karena persoalan PETI juga terjadi di berbagai daerah.

"Kalau penelitian berdasarkan pengalaman saya langsung. Data sangat mudah saya dapatkan karena fokus saya di Papua Barat, tapi secara nasional. Rata-rata daerah juga seperti ini," jelasnya.

Penyusunan Taskap juga mendapat dukungan dari tim yang membantu proses pengumpulan dan pengolahan data. Dari proses tersebut, Sonny merumuskan 11 rekomendasi untuk mendorong legalisasi dan penguatan tata kelola pertambangan emas rakyat.

Tiga rekomendasi utama diarahkan untuk mempercepat implementasi kebijakan. Pertama, mempercepat implementasi One Map Policy serta melakukan harmonisasi terhadap tumpang tindih RTRW. Kedua, membangun Koperasi Pertambangan Rakyat melalui kolaborasi pentahelix. Ketiga, mendorong sertifikasi sesuai SNI 8880:2020 serta penguatan standar dan akreditasi agar hasil pertambangan emas rakyat dapat memenuhi persyaratan pasar, termasuk peluang memperoleh akreditasi London Bullion Market Association (LBMA).

Bagi Sonny, salah satu kekuatan Taskap tersebut terletak pada keberanian mengangkat persoalan Papua sebagai isu strategis nasional.

"Ini menurut saya pribadi karena saya mengangkat isu Papua," katanya. Sonny menyadari gagasan

legalisasi pertambangan emas rakyat dapat berhadapan dengan kepentingan berbagai pihak, termasuk konsorsium besar yang memiliki kepentingan dalam penguasaan pertambangan emas. Namun, Sonny berharap kebijakan ke depan mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama.

"Tantangan terbesar saat ini adalah tulisan saya akan mengganggu kepentingan-kepentingan konsorsium besar yang memiliki kepentingan dalam hal ingin menguasai pertambangan emas ini. Tapi saya berharap pemimpin yang transformasi bisa berpihak kepada rakyat dan bisa membuat regulasi baru agar PETI menjadi legal," ungkapnya.

Melalui Taskap tersebut, Sonny tidak sekadar menawarkan legalisasi terhadap aktivitas pertambangan emas rakyat. Gagasan yang dibangun diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan emas rakyat. (AMT/MDF)





- 1 Lemhannas RI menyebarkan semangat kebangsaan pada Milad Ke-104 Pesantren Sukahideng, Jumat (17/07)
- 2 DPP Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI masa bakti 2026-2031 menggelar rapat kerja nasional perdana di Bandung, Jawa Barat. Senin (20/07)
- 3 Pelantikan Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI di Ruang Hening, Gedung Trigatra Lemhannas RI, pada Selasa (07/07).





4

4 Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si. memimpin Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI di Lapangan Tengah Lemhannas RI, Senin (17/08)



5

5 Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si menghadiri Pidato kenegaraan Presiden RI menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 RI pada Selasa (14/08)

6 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun 2025 pada Selasa (04/08)



6

7 Lemhannas Goes To Campus Universitas Warmadewa Bali. Selasa (01/09)

8 Lemhannas Goes To Campus Universitas Mulawarman Kalimantan Timur. Selasa (22/09)

9 Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan Kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri P4N 70, Selasa (11/09)



Permohonan Informasi Semakin Mudah

Kontak PPID Lemhannas RI



Biro Humas Settama Lemhannas RI

Gedung Asta Gatra Lantai 2
Jalan Medan Merdeka Selatan
No. 10 Jakarta, 10110



021-383 **2108/2463**
Fax (021) 3832108, 3832109



0881 0820 51965



ppid.lemhannas.go.id



Senin - Jumat
08.00 - 15.00 WIB





SELAMAT DATANG DAN SELAMAT MENGEKAN TUGAS

KOMJEN POL. Dr. Drs.
GATOT TRI SURYANTA, M.Si., CSFA
SEKRETARIS UTAMA LEMHANNAS RI

